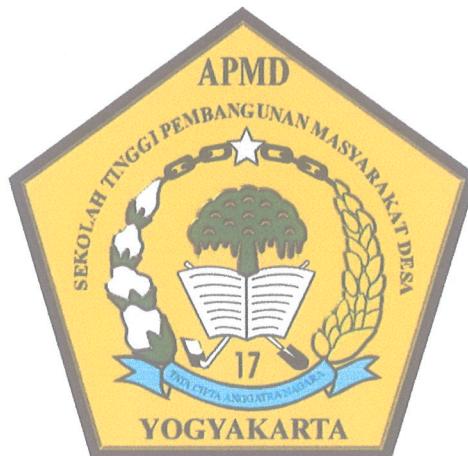


SKRIPSI
INOVASI DALAM PENGUATAN PEMERINTAH
KALURAHAN UNTUK MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN

**(Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun oleh:

YOHANA GRACE

21520127

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



**INOVASI DALAM PENGUATAN PEMERINTAH
KALURAHAN DALAM MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN**

**(Studi Kasus Di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



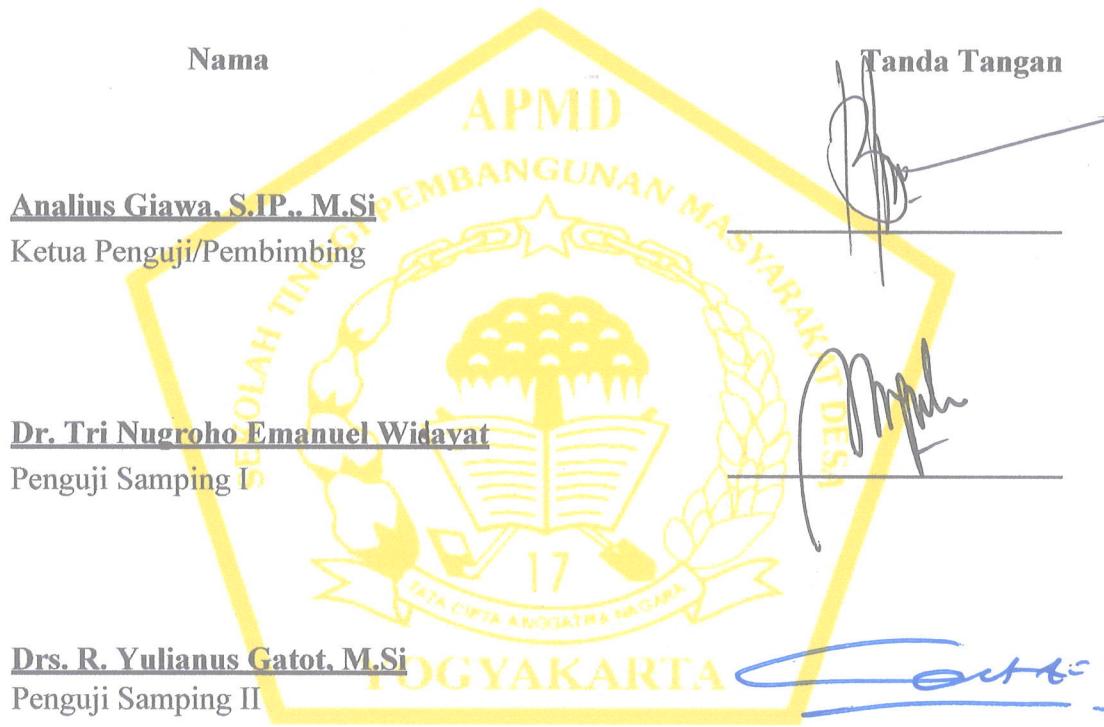
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

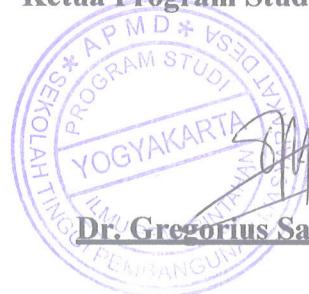
Hari : Rabu
Tanggal : 12 Februari 2025
Waktu : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yohana Grace

Nim : 21520127

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Inovasi Dalam Penguatan Pemerintahan Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan. (Studi Kasus Di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila kemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Yohana Grace
NIM : 21520127
Telp : 081326199482
Email : yohanagrace580@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

INOVASI DALAM PENGUATAN PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN (Studi Kasus Di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Yohana Grace
21520127

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah Memberikan anugerah dan melimpahkan Rahmat serta karunia-nya, berupa kesehatan, rezeki, waktu, dan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan segenap cinta dan rahmatnya dalam menyertai saya selama proses penulisan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa sarjana program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Harefago Waruwu dan Ibu Dewi Sinta Juita Sapalakkai, yang selalu mencurahkan segalah kasih sayang dan dukungan serta doa. Terimakasih atas usaha dan kerja keras untuk membiayai pendidikan perguruan tinggi saya dan mendukung kebutuhan belajar saya. Hal ini tentunya menjadi semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Kakek Martin Sapalakkai (Almarhum), Nenek Salidarna, Tante Rina Julianti Sapalakkai, Tante Leni Astria Sapakkai, Paman Mafirman Sapalakkai (Almarhum), Om Doris Sikaraja, Om Matheus, telah memberikan semangat serta dukungan selama Pendidikan sampai proses skripsi.
4. Kepada Adek penulis, Kezia Grace Waruwu, Manuella Grace Waruwu, Benetta Grace Waruwu, Eugenia Valerie, Louis Meshach, Winani Teslonika Sapalakkai,

Griselya Maria Ernes Sikaraja, telah memberikan semangat serta dukungan selama proses skripsi.

MOTTO

“Apapun Juga Kamu Perbuat, Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk
Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia”

(Kolose 3:23)

“Pencobaan-Pencoban Yang Kamu Alami Ialah Pencobaan Biasa, Yang Tidak
Melebihi Kekuatan Manusia. Sebab Allah Setia Dan Karena Itu Ia Tidak Akan
Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatanmu”

(1 Korintus 10:13)

“Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan atas segala kemurahan dan kasih Yesus Kristus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Inovasi Dalam Penguatan Pemerintah Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan (Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, agar dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sangat menyadari atas kesalahan dan ketidak sempurnaan dalam tulisan ini. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan para dosen, keluarga, dan teman-teman lainnya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Selah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Penguji Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat dan Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si. mengucapkan terima kasih banyak telah menguj skripsi serta memberikan masukan saran dan solusi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
7. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan seluruh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Mentawai yang sudah memberikan kesempatan Tugas Belajar (Beasiswa) kepada saya dalam menempuh Pendidikan perguruan tinggi strata satu (S1)
8. Kepada Bonivarius Tatebburuk, S.Sos terimakasih sudah memotivasi dalam poroses Pendidikan.
9. Kepada teman-teman penulis Reni, Aulia, Marlis, Viani, Eyling, yang telah berteman dan berjuang bersama di ditempat perantauan kota yang jauh dari kampung halaman ini. Semoga kita bisa ketemu Kembali dilain hari.
10. Kepada teman-teman satu asrama putri seperjuangan saya, fani, peby, Audy, Katrine, Elpi, dan Lisa, yang telah berteman dengan saya serta berjuang bersama di setiap proses Pendidikan di Yogyakarta semoga sukses selalu untuk kita semua.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 12 Februari 2025

Penulis



Yohana Grace

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
INTISARI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Literature Review.....	8
G. Kerangka Konseptual.....	16

1. Inovasi	16
2. Pemerintah.....	21
3. Pemerintah Kalurahan	23
H. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Unit Analisis Data	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
4. Teknik Analisis Data.....	31
BAB II DESKRIPSI POTENSI EKONOMI KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN KAB. BANTUL.....	34
A. Sejarah Kalurahan Banguntapan.....	34
B. Keadaan Geografis	35
C. Keadaan Demografis.....	36
1. Jumlah Penduduk	36
2. Jumlah Penduduk Menurut Gender.....	36
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur.....	37
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama	39
5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	40
6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	41
D. Sarana Dan Prasarana Kalurahan.....	43
1. Prasarana Pendidikan	43
2. Prasarana Ibadah	44
3. Prasarana Kesehatan.....	45

4. Prasarana Umum	46
E. Potensi Ekonomi	47
F. Pemerintah Kalurahan Banguntapan.....	52
1. Visi dan Misi	52
2. Bidang Pemerintahan Kalurahan.....	53
3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	57
4. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	61
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	61
BAB III INOVASI DALAM PENGUATAN PEMERINTAH KALURAHAN	
UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN POTENSI	
KALURAHAN	66
A. Kualitas Sumber Daya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	
Kalurahan.....	67
1. Sumber Daya Manusia	67
2. Sumber Daya Alam	70
B. Kinerja Kelembagaan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan	
Asli Kalurahan	72
1. Kelembagaan Kalurahan	72
2. Kinerja Pemerintah Kalurahan	74
C. Hasil Partisipasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	
Kalurahan.....	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82

B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Table I.1 Deskripsi Data Informan.....	27
Tabel 2.1 Tempat Usaha dan Perdagangan	51
Tabel 2.2 Struktur Pemerintah Kalurahan.....	54
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan.....	57
Tabel 2.4 Kelompok Kesenian Kalurahan	62
Tabel 2.5 Kelompok Petani dan Peternak	63

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	37
Diagram 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur.....	38
Diagram 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	39
Diagram 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	40
Diagram 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian.....	42
Diagram 2.6 Prasarana Pendidikan	43
Diagram 2.7 Prasarana Ibadah	44
Diagram 2.8 Prasaran Kesehatan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tanah Kas Kalurahan	48
Gambar 2.2 Sewa Kios Kalurahan	49
Gambar 2.3 Aula/Gedung Serbaguna Kalurahan.....	50
Gambar 2.4 tempat Penampungan Sampah Terpadu 3R	59
Gambar 2.5 Wisata Gua Seluman	60
Gambar 2.6 Wisata Embung Padukuhan Sorowajan	60
Gambar 4.1 Pasar Bantengan Kalurahan Banguntapan	84
Gambar 4.2 Pasar Bantengan Kalurahan Banguntapan	85
Gambar 4.3 Contoh Pasar Modern.....	86
Gambar 4.4 Contoh Pasar Modern.....	86

INTISARI

Dalam hidup kita menginginkan sesuatu yang berkembang. Sebab hidup akan sangat membosankan, maka dari itu kita butuh yang baru dan menantang. Sesuatu yang baru tersebut bisa kita sebut dengan inovasi. Tujuan dari Penelitian ini adalah menganalisis tentang Inovasi dalam penguatan Pemerintahan Kalurahan untuk Mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan. Adanya penelitian ini berangkat dari adanya potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh pemerintah Yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi persoalan yang dimana banyak kendala yang dihadapi para pemangku Pemerintah Kalurahan. Dalam proses mengoptimalkan potensi yang ada serta pengelolaan sumberdaya yang dilakukan secara efektif dan efisien di Kalurahan Banguntapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan beberapa informan seperti Pemerintah Kalurahan dan tokoh masyarakat yang telah menerima pelayanan dan pemanfaatan tanah kas desa. Pemilihan subjek tersebut didasarkan pada hubungannya dengan objek penelitian yang diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah kas desa dapat mengoptimalkan pendapatan utama desa dan potensi sumber daya alam desa yang tersedia. Langkah yang perlu dilakukan untuk menjamin inventarisasi tanah kosong di desa adalah dengan memastikan data aset tanah desa. Penggunaan tanah desa menimbulkan kerugian dan kerusakan lingkungan. Pemerintah kecamatan berperan penting dalam membimbing tim pengelola untuk mencapai tujuannya, termasuk menyelesaikan masalah tanah dan meningkatkan pendapatan asli desa. Oleh karena itu, perlu diadakan pengawasan dari berbagai pihak secara berkala untuk memastikan pemanfaatan tanah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga langkah ini nantinya akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Banguntapan

Kata Kunci: Inovasi, Pemerintah Kalurahan, Pengelolaan Potensi Kalurahan.

SUMMARY

In life we want something to grow. Because life will be very boring, therefore we need something new and challenging. We can call something new innovation. The purpose of this study is to analyze Innovation in strengthening the Village Government to Optimize the management of village potential. The existence of this research departs from the potential possessed by the Government of Banguntapan Village, Bantul District, Special Region of Yogyakarta. With the potential of natural resources that can be developed by the government, which has an impact on improving the welfare of the community. However, the problem is that there are many obstacles faced by the stakeholders of the Kalurahan Government. In the process of optimizing the existing potential and resource management is carried out effectively and efficiently in the Banguntapan Village.

This study uses an exploratory qualitative research method. The data collection techniques in this study are carried out through observation, interviews, and documentation. This research involved several informants such as the Village Government and community leaders who have received services and the use of village treasury land. The selection of the subject is based on its relationship with the research object which is expected to provide relevant data and information related to the problem being studied. The data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing

The results of this study show that the use of village treasury land can optimize the main income of the village and the potential of available village natural resources. The step that needs to be taken to ensure the inventory of vacant land in the village is to ensure data on village land assets. The use of village land causes environmental losses and damage. The sub-district government plays an important role in guiding the management team to achieve its goals, including resolving land problems and increasing the village's original income. Therefore, it is necessary to hold periodic supervision from various parties to ensure the use of village land in accordance with applicable regulations. So that this step will later bring long-term benefits to the people of Banguntapan Regency

Keywords: *Innovation, Kalurahan Government, Kalurahan Potential Management.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi merupakan pemberian sebagian kekuasaan atau kewenangan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah atau bisa dikatakan tingkat Pemerintahan yang lebih rendah. Sehingga dapat membuka peluang bagi Pemerintah agar lebih dapat berinovatif dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, penyebutan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari gabungan atas beberapa padukuhan yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri serta berkedudukan langsung dibawah Kapanewon disebut sebagai kalurahan. Maka dari itu penyebutan kata Pemerintah desa di DIY disebut sebagai Pemerintah Kalurahan.

Di daerah Kalurahan/desa pasti memiliki berbagai potensi sumber daya, hal ini adalah alasan mengapa konsep pembangunan desa begitu penting, mengingat banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa. Pemanfaatan sumber daya sangat penting untuk pertumbuhan ekonominya. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu

cara untuk mengatasi ini adalah melalui implementasi kewirausahaan desa, di mana masyarakat desa menyediakan sumber daya dan fasilitas secara mandiri untuk meningkatkan kondisi sosial pedesaan. Sehingga Pemerintah Kalurahan memiliki hak untuk mengatur kewenangan yang luas dalam mendorong dan mengelola aset desa guna mendukung kebutuhan pemerintahan dan pembangunan Desa, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pembangunan dan pengelolaan desa, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan sendiri diperlukan yang namanya inovasi. Inovasi sangat penting terutama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan yaitu inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Sehingga Kalurahan sebagai unit Pemerintahan terkecil memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif. Namun disisi lain, masih mengalami tantangan dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan dikarenakan berbagai faktor seperti sumber daya yang terbatas, kurangnya kapasitas pengelolaan, dan minimnya inovasi dalam mengembangkan potensi lokal. Oleh karena itu, hal ini menjadi sesuatu yang perlu diatasi.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada kepala desa dalam mengelola anggaran dan sumber daya. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kalurahan untuk menciptakan inovasi dalam mencari sumber pendapatan yang baru. Menjadi inovatif adalah kunci utama

untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi inovasi masih menghadapi berbagai kendala, contohnya kurangnya pemahaman dan kapasitas dalam mengembangkan inovasi. Banyak Kalurahan yang belum memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, termasuk sumber daya alam, budaya, dan pariwisata. Selain itu, kesulitan dalam mendapatkan informasi dan teknologi juga menghambat kemajuan inovasi. Hambatan sosial dan ekonomi di setiap Kalurahan berbeda-beda, sehingga pendekatan inovasi yang sukses di satu Kalurahan belum tentu bisa diimplementasikan di Kalurahan lainnya.

Peran Pemerintah Kalurahan sangat penting dalam mengelola potensi lokal, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam sistem otonomi Daerah, diharapkan Pemerintah Kalurahan dapat menghubungkan kebijakan Pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam mengelola potensi kondisi yang bervariasi di Kalurahan, misalnya latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan agama, Pemerintah Kalurahan dihadapkan pada tantangan dan peluang. Pemerintahan Kalurahan Banguntapan, masih banyak Inovasi belum berjalan untuk mengoptimalkan potensi yang mendukung perekonomian Kalurahan berkelanjutan yang memberikan mamfaat jangka panjang. Mengoptimalkan potensi melibatkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan yang memberikan dampak positif, harus kreatif dengan menggunakan ide, gagasan, dan kemampuan yang dapat membantu masyarakat selama proses pengembangan. Dalam peneritian ini Pemerintah

Kalurahan Banguntapan memiliki potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan wirausaha yang dapat dikembangkan.

Untuk memanfaatkan potensi yang tersedia di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, antara lain:

1. Pasar Bantengan, yang terletak di Kalurahan Banguntapan, merupakan salah satu pusat utama sektor ekonomi di wilayah tersebut. Pasar ini berperan sebagai pusat perdagangan, menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi lokal.
2. Di samping itu, terdapat juga peluang, yang bisa memberikan penghasilan bagi masyarakat. Sektor pariwisata Goa Seluman, dan Embung yang ada di Kalurahan Banguntapan, dengan keindahan alam dan warisan budaya lokal yang kaya, berpotensi untuk menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pengunjung.
3. Seni dan budaya lokal, seperti pertunjukan seni dan kerajinan tangan, juga memiliki potensi untuk Pemerintah Kalurahan dalam upaya pelestarian dan promosi sehingga menarik minat wisatawan dan meningkatkan nilai budaya masyarakat.

Inovasi merupakan pembaharuan sumber daya yang sudah ada sebelumnya seperti sumber daya alam, energi, perekonomian, pemanfaatan teknologi dan lainnya. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki, Kalurahan Banguntapan memiliki kesempatan yang luas untuk tumbuh dalam pengelolaan

dan pengembangan potensi ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Inovasi dalam pengelolaan sumber daya yang diterapkan Pemerintah Desa dapat mencakup dari pengelolaan badan usaha milik Kalurahan dengan penguatan sistem melalui perbaikan pelayanan yang optimal. Pembangunan (BUMKal) yang lebih berfokus pada usaha lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan menaikkan pendapatan masyarakat.

Kendala yang ada dalam Kalurahan Baguntapan yaitu dalam bidang Pemerintah Kalurahan masih kurang maksimal kinerja Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya, padahal potensi yang ada seperti infrastruktur dan fasilitasi, yang tersedia. di Kalurahan Banguntapan cukup banyak yang bisa dijadikan inovasi baru di Kalurahan Banguntapan akan tetapi hingga saat ini dinilai masih kurang maksimal. seperti belum memiliki badan usaha kalurahan yang mampu memberikan masukan dan penghasilan dalam kas Kalurahan, pengelola tanah kas yang belum baik. maka pendataan inventarisasi tanah Kalurahan masih belum maksimal.

Pentingnya inovasi yang tepat dalam menghadapi permasalahan ataupun dalam perencanaan Pemerintahan Kalurahan menjadi kewenangan dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat diperhatikan oleh Pemerintah Kalurahan. Pengelolaan keuangan desa mencakup penerimaan Kalurahan dan pengeluaran Kalurahan. Pendapatan Kalurahan dapat berasal dari pendapatan asli Kalurahan maupun pendapatan sewa gedung, dan juga hibah tanah kas Kalurahan .

Menurut hasil observasi yang sudah dilakukan peneliti menemukan bahwa Kalurahan Baguntapan memiliki tanah kas Kalurahan, dan gedung multifungsi, kios dan ruko, merupakan aset desa yang telah dimiliki lama, yang pada saat ini operasional pengelolaan masih terus dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan setempat. Aset tersebut yang dimiliki Kalurahan Banguntapan merupakan sumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal), namun dalam kurang waktu dua tahun ini pihak terkait masih memaksimalkan surat izin dalam pengelolaan tanah kas Kalurahan dalam membangun tempat wisata yang berlokasi di Pringgolayan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul DIY.

Kalurahan Banguntapan dengan jumlah sumber daya yang tersedia tentunya memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Inovasi Dalam Penguatan Pemerintah Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan” (Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).**

Didasarkan pada permasalahan yang disebutkan, maka peneliti hendak melihat tindakan yang dilakukan pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan salah satu dari perspektif 5G yaitu Governing yang berkaitan dengan perbuatan atau aktivitas pemerintah desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pemerintahan Kalurahan dalam berinovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan?.

C. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Yang Dimiliki Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan.
2. Kinerja Kelembagaan Pemerintah Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan
3. Hasil Partisipasi Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini secara rinci adalah untuk mengeksplorasi inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua Manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan terkait inovasi dalam penguatan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan akademis.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi Pemerintah Kalurahan maupun masyarakat luas terkait dengan keberhasilan dalam pengelolaan potensi kalurahan serta sebagai bahan evaluasi dalam membuat ditingkat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang bermanfaat bagi Pemerintahan Kalurahan Baguntapan sebagai penyelenggara inovasi dalam penguatan Pemerintahan Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan.

F. Literature Review

Penelitian tentang inovasi pemerintahan Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pada awalnya penelitian ini sudah ada yang meneliti terdapat beberapa orang yang tertarik meneliti hal tersebut. Berikut ada beberapa penelitian terdahulu:

1. Jurnal Publik Corner Fisip Universitas Wiraraja Vol.17 No. 1, Juni 2022 dari Nur Inna Alfiyah, Dwi Listia Rika Tini yang bejulul “Inovasi Pemerintah Desa Lubuk Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Berkelanjutan”. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Desa Lobuk dalam upaya penerapan inovasi masa kini mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Desa Lobuk sendiri tergolong desa otonom karena telah memenuhi syarat desa dikatakan otonom, seperti peningkatan kinerja pembangunan di Desa Lobuk dimana program balaba merupakan layanan pengelolaan online bagi warga. Desa Lobuk berbasis aplikasi Android. Inovasi ini pertama kali diterapkan di Kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan kemajuan yang telah dicapai di Kabupaten Sumenep dengan memanfaatkan kemajuan yang sangat pesat dan kecanggihan teknologi. Memiliki aplikasi tersebut sangat bermanfaat karena akan semakin mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa Lobuk (Alfiyah and Tini 2022).

2. Jurnal Inovasi Daerah Vol. 2 No. 1, Juni 2023 dari Shadu Satwika Wijaya dan Hendi Purnawan yang berjudul “Inovasi Peningkatan Pendapatan Desa (Kasus Desa Karangpucung, Tambak, BANYUMAS)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa dapat dilakukan melalui teknik pengumpulan pendapatan yang tepat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kontrol internal, dan kepatuhan terhadap peraturan. Inovasi-inovasi tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat otonomi desa. Kesimpulan penelitian adalah terdapat inovasi sistem yang tepat untuk meningkatkan pendapatan Desa Karang Pucung (Wijaya and Purnawan 2023).

3. Jurnal Ilmu komunikasi dan sosial humaniora Vol. 2 Tahun 2021 Hal 2722-9025 dari Desiana Reni Diyantasari Hikmah Muhamimin, Dian Wijaya, “Inovasi Tata Kelola Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa”. Hasil pembahasan inovasi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa peningkatan pendapatan asli desa yang ditujukan pada Gria Kuliner Bunderan Pacet, terlaksana dengan baik dengan mencermati 5 indikator yaitu manfaat relatif yang terdapat pada keuntungan tersebut sehingga dengan dibangunnya Gria Kuliner Pacet terdapat keuntungan yang besar dalam penyajiannya kepada keterpaduan pemerintah desa dalam pengelolaan BUM Desa, kompleks ketiga terwakili dalam proses penjualan yang sudah ada dalam peraturan tersebut. pemerintahan desa, yaitu. Griya Kuliner Bunderan Pacet divisi keempat dalam promosi yang baik karena adanya upaya untuk memimpin pembangunan Gria Kuliner Desa Bunderan menjadi destinasi wisata kuliner, Komunikasi Skill kelima dalam promosi yang baik dan dapat dipublikasikan di masyarakat karena hasil inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah desa adalah Griya Kuliner Bunderan Pacet yang dapat meningkatkan eksistensi masyarakat berupa pasar sayur dari BUM, sehingga dari hasil penelitian berdasarkan data yang dimiliki para ilmuwan dapat disimpulkan mengenai Griya Kuliner Bunderan terdapat pengembangan dari segi sistem pengelolaannya (Diyantasari, Wijaya, and Muhamimin 2021)
4. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 6 No. 2 Tahun 2018 dari Seri Fathul Hardiana, Adam Idris dan Melati Dama yang berjudul “Upaya Peningkatan Pendapatan

Asli Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan pemungutan retribusi pasar desa yang sudah dilaksanakan dengan baik, hasil pemungutan retribusi pasar desa cukup besar untuk meningkatkan pembangunan desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mansalong juga sudah dilakukan oleh pemerintah desa dengan adanya BUM Desa masyarakat dapat menciptakan peluang usaha dan alokasi dana desa Mansalong termasuk dalam kategori sangat baik (Hardiana, Idris, and Dama 2018).

5. *Journal of Social Development Studies* Vol. 4 No.2, Tahun 2023 dari Jairi Irawan, Bintoro dan Erna Setijaningrum yang berjudul “Inovasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Neo Institusionalisme”. Hasil penelitian ini menghasilkan, antara lain: pertama, inovasi kebijakan tidak terlepas dari peran aktor kunci di dalamnya, kedua, inovasi kebijakan yang telah dilakukan BUM Desa telah meningkatkan pendapatan asli desa dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 (Irawan, Wardiyanto, and Setijaningrum 2023).
6. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 12 No. 2, Agustus 2022 dari Putri Karuniyati, Adji Suradji Muhammad dan Mahadiansar yang berjudul “Strategi Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kondisi sosial

budaya masih mencerminkan keluwesan budaya asli Desa Kuala Sempang dan program yang dilaksanakan mendapat dukungan masyarakat. Ketahanan perekonomian mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas pengelolaan, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program, lingkungan dan infrastruktur terus menghadapi kendala. Strategi kemandirian desa melalui program inovasi di desa Kuala Sempang sudah cukup optimal karena berkaitan dengan pencapaian maksud dan tujuan program, meskipun belum berjalan maksimal. Rekomendasi pemerintah terhadap penelitian ini diharapkan dapat mendorong seluruh desa untuk melakukan inovasi sehingga mampu memberikan ide-ide inovatif yang dapat memberikan kesimpulan bahwa sosial budaya di desa Kuala Sempang saat ini dinilai sudah cukup baik. Solidaritas sosial warga masih sangat erat dan rasa aman di desa serta ketahanan ekonomi tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan perekonomian desa Kuala Sempang cukup baik dengan adanya program inovasi desa yang dapat mendorong peningkatan kualitas penggunaan dana desa secara efektif dan efisien, memberikan banyak contoh inovasi dalam proses perencanaan pembangunan desa dan memperkuat peran pendamping dengan mengacu pada proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa melalui berbagai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa dalam jangka menengah. (Karuniyati et al. 2022).

7. Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1, April 2024 dari Wilda Prihatiningtyas, Indria Wahyuni, Upik Dyah Eka Noviyanti dan Ardhana Christian Noventri yang berjudul “Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa yang Inovatif dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Dongko, Trenggalek”. Hasil penelitian ini menjelaskan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum telah berjalan dengan lancar dan menghasilkan beberapa luaran diantaranya publikasi media online, video kegiatan (youtube) dan reels IG sebagai sarana promosi, meningkatnya pemahaman pentingnya BUM Desa sebagai instrumen pendukung pengembangan desa wisata, serta draft paket wisata di Desa Dongko. Adapun evaluasi dalam penyelenggaraan desa wisata di Desa Dongko yang kemudian hal tersebut menjadi dasar untuk pendampingan berikutnya dapat dijelaskan dengan Keterbatasan SDM di wilayah desa yang mau dan mampu berperan aktif untuk mengembangkan potensi desa. Desa Dongko lebih fokus pada wisata budaya, yakni Budaya Turonggo Yakso. Sedangkan untuk wisata alam, secara administratif berada di wilayah desa lain. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan kolaborasi dengan desa-desa tetangga untuk mengembangkan desa wisata di Kecamatan Dongko. Sarana promosi yang masih minim, namun terbantu dengan adanya momen-momen tahunan seperti Gebyar Suro (Prihatiningtyas et al. 2024).
8. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 01, No 03, Mei 2022 Hal 66-71 dari Dewi Sartika yang berjudul “Sosialisasi strategi kebijakan program inovasi desa (village innovation program) Terhadap Peningkatan Ekonomi

Pedesaan Di Kabupaten Tapanuli Selatan” Hasil penelitian ini menjelaskan masih banyak desa yang mengalami keterbatasan kapasitas, dengan kata lain dianggap masih belum mampu mengelola dana desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Padahal UU Desa memberikan dukungan finansial desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan bermodal kewenangan dan anggaran, tentu harapannya desa mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif dan inovatif (Sartika 2022).

9. Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Vol. 5 No. 1, Desember 2022 dari Sholeh Kurniandini dan G. Ika Pradewi yang berjudul “Pengembangan Desa Inovatif Untuk Meningkatkan Perekonomian dan kemandirian Masyarakat di Desa Banaran Kabupaten Temanggung”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa desa inovatif merupakan sebuah konsep upaya pembangunan desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak cara dan upaya untuk memajukan suatu desa, namun kunci terpenting adalah pemimpinnya. Pemimpin desa harus mampu melihat ke segala arah sebelum dapat menentukan arah pembangunan desa. Terakhir, pemimpin desa harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik akademisi, pengusaha, bahkan media. Pembangunan desa yang inovatif akan berhasil jika masyarakat berpartisipasi aktif (Kurniandini and Pradewi 2023).
10. Jurnal *Economics and Digital Business Review* Vol. 3 No. 2, tahun 2022, Hal. 397- 411 dari Nirmala A. Sahi, Arifin Tumuhulawa, Muten Nuna, Ahiar Biongan dan Lisnawati Pauweni yang berjudul “Upaya Peningkatan

Pendapatan Asli Desa Melalui Kebijakan BUM Desa di Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Hal ini memungkinkan desa menciptakan strategi atau kreativitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa (Nirmala et al. 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan sekarang. Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu menganalisis berbagai inovasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan dan tujuan umum kedua penelitian ini juga sama ingin mengetahui bagaimana inovasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi Sedangkan perbedaannya yaitu dari kesepuluh jurnal tersebut inovasi lebih mendalam peningkatan melalui BUM Desa, pelayanan, tata kelola, pembangunan desa, pengabdian/sosialisasi, dan kepemimpinan, yang mempermudah Kalurahan dalam peningkatan kapasitas. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini tentang inovasi pemerintahan Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan. dari kesepuluh jurnal yang dimana penelitian yang saya gunakan menggunakan perspektif 5G yaitu governing perbuatan pemerintahan Kalurahan.

G. Kerangka Konseptual

1. Inovasi

a) Pengertian Inovasi

Inovasi salah cara melakukan perubahan yang baru dalam rangka mencapai tujuan contohnya pada sesuatu yang baru, baik berupa ide, gagasan, metode, alat, produk, proses, maupun jasa. nilai tambah dan manfaat yang signifikan bagi yang menerapkan bisa berupa peningkatan efektivitas, kualitas, kinerja atau pemecahan masalah yang lebih baik.

Dan Inovasi tersebut bertujuan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang berkualitas untuk Meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat serta mempersiapkan pengembangan sumber daya yang berdaya saing. Dengan adanya Program Inovasi Desa yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi serta kerjasama dengan unit program untuk mengembangkan dan memperkuat masyarakat desa, didukung dengan upaya peningkatan daya dukung desa melalui inovasi desa.

Menurut (Garcia and Calantone 2002) menyatakan bahwa inovasi (*innovation*) diartikan sebagai upaya dan Tindakan dalam bentuk pengembangan sesuatu proses untuk menjadi lebih baik atau bentuk pengembangan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi pengguna. Adapun istilah inovasi (*innovation*) diartikan sebagai tingkat inovasi yang dilakukan oleh salah satu kelompok.

Menurut Everett & Rekha dalam (Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu 2020) menyatakan bahwa Inovasi adalah sesuatu ide gagasan, praktek atau obek yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau kelompok untuk diadopsi.

Sedangkan Menurut (Juliarso, & Hidayat 2017) Inovasi dalam sebuah organisasi Pemerintahan saat ini merupakan suatu keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kata inovasi berasal dari Bahasa Inggris *innovation* berarti suatu perubahan. Inovasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input diartikan adalah pola-pola pemikiran atau ide manusia yang disumbangkan pada temuan baru. Selanjutnya inovasi yang berkaitan dengan output berdasarkan defenisi tersebut lebih ditunjukan pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola pemikiran dan metode atau teknik kerja yang dilakukan.

Oleh karena itu, inovasi Pemerintah desa mengacu pada kemampuan dan inisiatif Pemerintah desa untuk mengembangkan solusi inovatif dalam mengatasi berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Menurut (Juliarso, & Hidayat 2017), Inovasi biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Input mengukur sumber daya yang tersedia dalam proses inovasi
- b. Proses menggambarkan sistem organisasi dan manajemen sistem proses inovasi.
- c. Output menentukan hasil inovasi organisasi dalam keberhasilan jangka pendek yang direalisasikan dari kegiatan inovasi.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan inovasi dengan menerapkan ide-ide baru kreatif dan mengembangkannya menjadi proses yang dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan secara praktis. Inovasi memerlukan lebih dari sekedar ide yang di perlukan juga adanya Langkah-langkah sistematis untuk menerapkan dan menyebarluaskan ide tersebut ini adalah proses yang melibatkan pemikiran baru, imajinasi, dan asosiasi ide-ide yang ada. Dan inovasi bisa muncul dalam berbagai bidang termasuk seni, musik, sastra ilmu, pengetahuan, teknologi, dan bisnis.

b). Manfaat Inovasi

Manfaat inovasi adalah yang dikembangkan dan baru, inovasi memiliki manfaat dan juga tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di atas dalam pengertian inovasi, inovasi adalah ide atau gagasan yang membutuhkan proses untuk dilaksanakan. Inilah bagaimana tujuan mencirikan inovasi.

Berikut adalah beberapa manfaat inovasi:

- 1) Memberikan solusi untuk memecahkan masalah inovasi adalah mampu memecahkan masalah. Sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama yang tampaknya penuh masalah. Kehadiran ide dan konsep baru dapat memecahkan masalah yang ada dengan baik.

Hal ini terutama berlaku dalam hal masalah produk: ketika suatu produk lama tidak dapat dipasarkan lagi, maka perlu untuk memperbaruiinya agar dapat membangkitkan kembali minat masyarakat.

- 2) Dapat meningkatkan produktivitas memunculkan ide dan konsep baru menuntut seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan pikiran cemerlangnya. Saat kita bereksperimen dan mengeksplorasi, tidak hanya ide tetapi juga inovasi yang tumbuh. menjadi inovatif berarti seseorang telah menggunakan waktu untuk mempertahankan produktivitas di tempat kerja.
- 3) Dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Inovasi dapat menghasilkan atau bahkan menciptakan barang-barang yang unik dan berkualitas tinggi. Orang-orang yang berbakat dalam inovasi tergolong orang-orang yang berkualitas, terutama jika inovasi yang mereka ciptakan berhasil diimplementasikan, yang berarti mereka dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada.

c). Tujuan Program Inovasi

Tujuan utama Program Inovasi Desa adalah mendorong pembangunan desa yang unggul, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pengembangan dan penguatan masyarakat desa. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk mendorong produktivitas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada masyarakat desa. Kapasitas desa untuk mengembangkan rencana pelaksanaan dan penguatan masyarakat desa yang inovatif dapat

dingkatkan, serta pengetahuan dan keterampilan masyarakat dapat ditingkatkan (petunjuk teknis pelaksanaan). Tujuan khusus program inovasi desa yakni:

- a. Meningkatkan penggunaan Dana Desa melalui proses pengelolaan informasi yang sistematis, terencana dan partisipatif.
- b. Memperkuat kapasitas kepemimpinan Desa untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah yang lebih inovatif dan berkualitas untuk membangun dan memperkuat masyarakat desa.
- c. Memfasilitasi pengembangan kapasitas desa untuk melakukan pelaksanaan kegiatan inovasi desa.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kader untuk memperkuat masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan sosial dasar oleh masyarakat desa.

d) Sasaran Program Inovasi

Seluruh masyarakat desa dalam pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya desa dan tidak berfokus pada infrastruktur fisik yang kurang memperhatikan kebutuhan perekonomian lokal dan kewirausahaan masyarakat. Program Inovasi Desa kaya akan dukungan bagi seluruh masyarakat desa dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya desa dan tidak berfokus pada infrastruktur fisik yang kurang

memperhatikan kebutuhan perekonomian lokal dan kewirausahaan masyarakat.

2. Pemerintah

Pada dasarnya, pemerintah merupakan sebuah kelompok individu yang diberi wewenang legal oleh masyarakat lokal untuk mengatur interaksi dalam kehidupan bersama ini mencakup hubungan antara individu, individu dengan lembaga Pemerintah, dan lembaga Pemerintah dengan sektor swasta serta individu. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat terjadi dengan harmonis.

Menurut Inu Kencana Syafie dalam (Mawaddah 2017), Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, suatu badan atau organisasi yang mempunyai misi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Menurut Syafiee, pemerintahan adalah suatu organisasi orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan menentukan bagaimana masyarakat dapat diatur.

Menurut Ndraha, pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Pemerintah merupakan elemen kunci dari konstruksi negara, di samping fungsi hukum yang memberikan wewenang khusus untuk

menerapkan. Pemerintah secara luas diartikan sebagai aktivitas pengaturan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan nasional. Sementara secara sempit, Pemerintahan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan sifatnya untuk mencapai tujuan nasional (Astomo 2014). Penyelenggara pemerintah ditingkat desa melibatkan pengelolaan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Kalurahan memiliki peran dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Menurut Nurcholis (Siswanto 2019), Tugas utama Pemerintah desa mencakup:

- a) Pelaksanaan urusan rumah tangga desa, pemerintahan umum
- b) Pembangunan dan pembinaan masyarakat
- c) Menjalankan tugas pembantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten

Pengurusan kepentingan masyarakat merupakan aspek proses dalam peran dan tanggung jawab kepala Desa bertanggung jawab kepada desa sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintah. Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di Desa, Upaya pembinaan sosial masyarakat Desa, dan pemberdayaan komunitas setempat. Fungsi Pemerintah memiliki fungsi (regulasi dan pengaturan) dalam mengatur berbagai sektor dalam masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang mencakup regulasi

Pemerintah atau peraturan-peraturan lainnya. Pemerintah berfungsi sebagai entitas yang dapat melaksanakan regulasi guna memastikan kelangsungan hidup yang baik dan dinamis masyarakat

3. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah desa adalah salah satu Lembaga Pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah pada tingkat desa. Pemerintah Desa pada saat ini tidak hanya menangani urusan kewenangan formal melainkan juga urusan kewenangan informal seperti adat, agama. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan Pemerintah desa termasuk dari kegiatan yang dilakukan dan diselenggarakan dalam rangka pemerintah yang mana dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan pemerintah desa yang akan dibantu oleh perangkat desa yang merupakan bagian dari Pemerintahan desa.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 25 pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pada pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan. Dan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Menurut pasal 19 kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan atau efektifitas suatu pemerintahan atau tugas-tugas desa adalah kepemimpinan, artinya kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa di desa harus dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta mengatur staf-staf yang dipimpinnya.

Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, penyebutan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari gabungan atas beberapa padukuhan yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri serta berkedudukan langsung dibawah Kapanewon disebut sebagai kalurahan.

Pengertian Pemerintah Kalurahan adalah sebagai penyelenggara urusan dilakukan oleh sesepuh Kalurahan yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan desa. Dalam kehidupan

bernegara, pemerintah diperlukan untuk mengatur rakyat, melindungi rakyat dan memenuhi kebutuhan rakyat, karena sifat negara adalah pemaksaan, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, maka semua wilayah memiliki batas-batas yang dapat dengan mudah diawasi dan dikendalikan serta diatur. Setiap daerah memiliki Pemerintahan dan aparatur pemerintahan masing-masing mulai dari Desa, pengaduan, kecamatan, wilayah administrasi, provinsi dan Pemerintah pusat (Sugiman 2018).

Desa adalah pembagian wilayah administrasi di bawah wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan lembaga Pemerintah yang mengurus urusan pemerintahan Desa, yang bertugas mengatur keuangan desa, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mengatur keuangan desa. potensi lokal yang ada. Sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan manfaat pembangunan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas pada perangkat desa memudahkan pelaksanaan tugas tersebut, oleh karena itu pelaksanaan perangkat desa memerlukan tindakan yang jelas yang akan memudahkan pelaksanaan tugas tersebut.

Pemerintahan Kalurahan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, Kalurahan adalah instansi pemerintah yang mengurus urusan di tingkat desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk kepentingannya. komunitas.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendukung pengembangan manusia sejati dari masyarakat terpinggirkan dan minoritas

dan untuk memberdayakan kelompok masyarakat ini secara sosial ekonomi sehingga mereka lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, tetapi juga dapat berperan dalam pembangunan masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif eksploratif. menurut Cresswell dalam (Asiva Noor Rachmayani 2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif eksploratif adalah pendekatan untuk mengesplorasi dan memahami makna individu atau kelompok dalam menanggapi masalah social atau manusia. juga menjelaskan bahwa (Nezha 2014) penelitian kualitatif eksploratif mencoba untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan di bidang yang sebelumnya masih kurang diteliti. Pendekatan ini mencari pengetahuan dasar dan ide pada bidang baru tersebut. Dalam prosesnya penelitian kualitatif eksploratif ini menggunakan pertanyaan terbuka dan dilengkapi dengan observasi.

2. Unit Analisis Data

Unit analisis merujuk pada pemilihan partisipasi dan responden dari sebuah penelitian unit analisis dipilih berdasarkan kemampuan dalam menjelaskan sebuah pengalaman (Sudarta, 2022).

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi partisipan atau informan dalam memberikan wawasan. Dalam

penelitian informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian serta mengidentifikasi informan berdasarkan tujuan tertentu. Hal ini diperlukan untuk menemukan kondisi yang cocok terkait inovasi yang ada di kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Berikut adalah subjek dari penelitian ini sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Deskripsi Informan

No	Nama Informan	Umur (Tahun)	Pendidikan Terakhir	Jabatan Pekerjaan
1.	Basirudin	58	SMA	Lurah
2.	Nunung Yulianto, S.Pd, M.Pd	30	S-2	Carik
3.	Drs, Endro Suryono		S1	Kaur Danarta
4.	Priyo Noerendro, Se	31	S1	Ulu-Ulu
5.	Wiyadi		S1	Ketua Bamuskal
6.	Suratno	44	SMK	Staf Pamong
7.	Sutik Mantoro	65	S1	Direktur Bumkal
8.	Sumartina	76	S1	Pelaku usaha Bumkal
9.	Tulus	27	SMK	Masyarakat
10.	Alfid Sulaksono	44	SMK	Dukuh Pelemwulung
11	Sigit Danan Herju	47	S1	Dukuh Jomblangan
12	Riska	29	S1	Masyarakat

Sumber: Data Lapangan Peneliti 2024

Berdasarkan table diatas, informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. (dua belas orang) diantaranya 10 orang pemerintah kalurahan banbuntapan (Lurah, Carik, Kaur Danara, Ulu-ulul, Ketua Bamus Kal, Staf Pamong, direktur Bumkal, pelaku usaha Bumkal, dan Dukuh) beberapa pelaku pemerintah inovasi pemerintah kalurahan banguntapan serta informan dari masyarakat berjumlah dua orang. Peneliti memilih informasi dari Kalurahan karena mereka berperan

penting dalam arah dari suatu kebijakan serata dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan masyarakat berperan penting dalam penyampaian aspirasi mereka, selain itu informan dari masyarakat sangat penting karena mereka yang merasakan dampaknya secara langsung terhadap inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini melihat kondisi dimana menggambarkan atau menjelaskan situasi dari subjek penelitian, dengan tujuan agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah inovasi pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dibutuhkan dalam mengolah data dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono dalam (Hasanah 2017) dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, metode observasi memiliki karakteristik khusus peneliti dapat belajar melalui pengamatan langsung yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Sedang menurut Yusuf dalam (Hasanah 2017) kunci dari keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti dapat melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti dapat menyimpulkan dari apa yang diamati dalam realitas dan konteks yang alami yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara suatu aspek dengan aspek lain pada objek yang diteliti.

Melalui teknik ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data penelitian dengan melihat semua interaksi dan tindakan yang terjadi di lokasi penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi wilayah, sumber daya dan potensi yang ada di Kalurahan Banguntapan.

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari responden yang terkait. wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dan narasumber.

Menurut Sugiyono (Ningtyas, 2014) jenis wawancara ini sudah termasuk kategori interview, dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berbeda pada pedoman wawancara yang dibuat. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan yang ada. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, tanpa menggunakan wawancara penelitian sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terkait inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk pengelolaan potensi di Kalurahan Banguntapan.

Adapun hal-hal yang penting yang akan diwawancarai adalah terkait inovasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kalurahan Banguntapan dalam mengoptimalkan pendapatan asli desa tantangan atau hambatan apa yang dihadapi

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2014) studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, lebih khusus yang dicari dengan metode ini berupa data yang berhubungan dengan inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari catatan lapangan pada saat wawancara dengan daftar informan, penelitian dan foto pada saat wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Penelitian ini akan mengacu pada fakta-fakta yang tersimpan dalam dokumen berupa catatan dalam bentuk tulisan, seperti dokumen RPJM Kal peraturan-peraturan terkait RKPKal, (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan APBKal, (Angaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan) selanjutnya juga terdapat dokumen berupa gambar Gedung kalurahan bangungan dan gambar potensi kalurahan dalam meningkatkan pendapatan asli Kalurahan. Dengan demikian, teknik dokumentasi penelitian yang telah melakukan penelitian akan melakukan pengecekan dan mencocokan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan secara langsung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Noeng Muhadjir dalam (Sudarta 2022) yaitu merupakan upaya dalam mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan lainnya yang telah dicatat dan dikumpulkan sebelumnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain analisis data dapat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Analisis data dalam sebuah penelitian akan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan dengan melakukan jawaban-jawaban dari narasumber ke dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa Langkah sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sekumpulan data yang memungkinkan peneliti membuat kesimpulan dan mengambil tindakan, penelitian ini menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang didapatkan dalam catatan dicatatkan. kemudian dideskripsikan dan digambarkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini berlangsung terus selama pelaksanaan riset yang dimulai bahkan sebelum data dilakukan hingga penelitian dalam pengumpulan data meliputi meringkas data (Sudarta 2022).

b. Penyajian Data

Penyajian data dan menganalisis kumpulan informasi terstruktur memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan tindakan. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, atau tabel yang menunjukkan dan mempelajari fenomena sebagai gambarannya sehingga mudah untuk dipedomani.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan Penarikan dan verifikasi. kesimpulan adalah bagian terahir dari penelitian yang mencari arti, pola, dan

proses yang diuji kebenaran kekokohan, dan valitnya. Penelitian ini memberikan makna pada data dan mencari hubungan antara berbagai konsep.

BAB II

DESKRIPSI POTENSI EKONOMI KALURAHAN BANGUNTAPAN, KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Kalurahan Banguntapan

Pembahasan mengenai profil Kalurahan akan memaparkan mengenai kondisi Kalurahan serta kondisi Pemerintahan Kalurahan. Kondisi Kalurahan merupakan salah satu aspek kondisi yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Kondisi Kalurahan memberikan gambaran mengenai sejarah Kalurahan, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi

Proses pembentukan Kecamatan Banguntapan didasarkan pada Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 November 1946 mengenai Pemerintahan Kecamatan., maka 6 (enam) Kalurahan di wilayah ini yakni Kalurahan Pengawat Rejo, Kalurahan Wonocatur, Kalurahan Sorowajan, Kalurahan Ketandan, Kalurahan Pringgolayan dan Kalurahan Pilahan digabung menjadi satu "Kalurahan Yang Otonom" dengan nama Kalurahan Banguntapan, dengan Bapak Dirjo Sumarto sebagai Lurah pertama. Nama tersebut kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kalurahan.

Pada awalnya Kalurahan Banguntapan terdiri dari 6 (enam) Kalurahan, yaitu:

1. Kalurahan Pengawat Rejo
2. Kalurahan Wonocatur

3. Kalurahan Sorowajan
4. Kalurahan Ketandan
5. Kalurahan Pringgolayan
6. Kalurahan Pilihan

Dari kalurahan-kalurahan tersebut diatas, berdasarkan, Undang-Undang RI Tahun 1947 Nomor: 17 tentang pembentukan Haminte- Kota Yogyakarta, akhirnya dari wilayah Gedongkuning ke Barat dan Gedongkuning ke Selatan yang masuk menjadi Kalurahan pilihan masuk wilayah Kota Madya Yogyakarta sampai sekarang Menurut sejarah pada Tahun 1797 di wilayah ini pernah didirikan kerajaan oleh **Sinuwun Banguntopo atau Sinuwun Hamengkubuwono ke II** yang diberi nama kerajaan Rejo Binangun atau Rejo Winangun, setelah diadakan penggabungan Kalurahan, nama Rejo Binangun atau Rejo Winangun dipakai sebagai nama Kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul diberi nama Kalurahan yang masuk di wilayah Kabupaten Bantul diberi nama Kalurahan Banguntapan yang berasal dari kata “BANGUNTOPO” sampai dengan sekarang.

B. Keadaan Geografis

Kalurahan Banguntapan merupakan salah satu dari 6 (enam) Kalurahan yang terletak di Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kalurahan Banguntapan merupakan Kalurahan terdekat dengan Kota Yogyakarta yang mana hanya berjarak 2 km dari kantor Balai Kota Yogyakarta. Kalurahan Banguntapan memiliki luas wilayah 819,3 Ha, dengan wilayah Kalurahan Banguntapan dibagi menjadi 12 dusun dan 212 RT.

Masyarakat Kalurahan Banguntapan dapat memanfaatkan tanah kas Kalurahan yang mana cukup relatif untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang mana sesuai dengan mata pencaharian yaitu usaha dan perdagangan. Dikarenakan wilayah Kalurahan Banguntapan ini sendiri berada pada dataran rendah yang mana relatif menjadi tempat usaha dan perdagangan.

C. Keadaan Demografi

Kalurahan Banguntapan terletak di Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambaran kondisi demografi yang mencakup perubahan dalam populasi, komposisi masyarakat secara keseluruhan dalam waktu tertentu.

1. Jumlah Penduduk

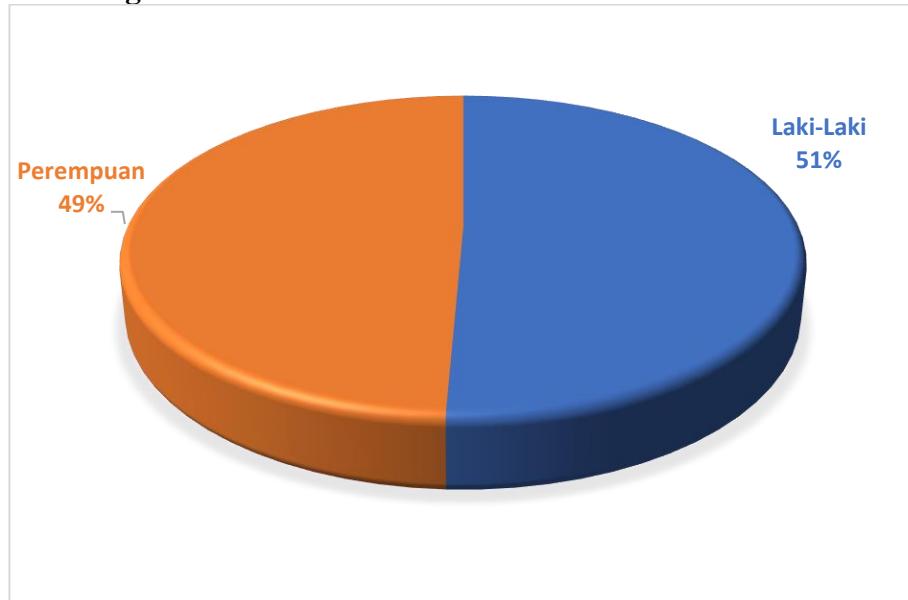
Menurut berdasarkan data monografi pada Tahun 2022, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki hampir seimbang. Pada Tahun 2022, jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan 38.476 Jiwa yang tersebar di 11 Pedukuhan dan 212 RT dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki-laki sebanyak 19.504 jiwa dan perempuan sebanyak 18.972 Jiwa.

2. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender

Guna melakukan kebijakan yang berperspektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih

efektif. Untuk membuat kebijakan berdasarkan perspektif gender, pengetahuan tentang persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin sangat penting sebagai berikut:

Diagram 2.1: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Maka dapat dilihat dari Diagram di atas jumlah penduduk sesuai jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan hampir sama jumlahnya. Jumlah terbanyak penduduk Laki-Laki sebesar 19.504 (51%) Jiwa, sedangkan jumlah penduduk Perempuan sebesar 18.972 (49%) Jiwa.

3. Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur

Data kependudukan kelompok umur juga diperlukan untuk menentukan kebijakan pembangunan yang tepat. Mengambil kebijakan dalam berbagai bidang seperti tenaga kerja, Pendidikan, dan lain-lainnya. Data berikut merupakan diagram yang menunjukkan data jumlah penduduk menurut usia dan umur pada tahun 2022, sebagai berikut:

Diagram 2.2: Jumlah Penduduk Menurut Umur/Usia



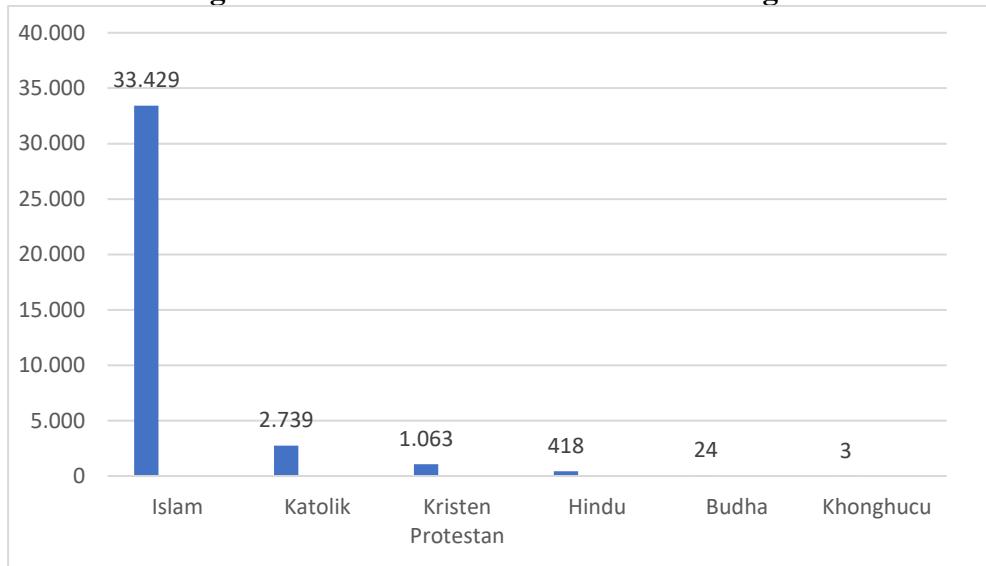
Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022

Berdasarkan Diagram diatas dapat diketahui bahwa jumlah terbanyak penduduk Kalurahan Banguntapan dengan umur 15 sampai 65 Tahun sebanyak 38.476 (70%) Jiwa, yang mana mayoritas penduduk di Kalurahan Banguntapan berada dalam usia produktif, sedangkan penduduk yang berusia belum produktif berumur 0 sampai 15 Tahun memiliki jumlah sebanyak 8.725 (23%) Jiwa dan, Penduduk yang tidak produktif berumur 65 Tahun memiliki jumlah sebanyak 2.600 (7%) Jiwa, sedangkan. Menurut data ini, penduduk dengan Usia belum produktif dan usia tidak produktif dikategorikan sebagai penduduk usia ketergantungan, sedangkan penduduk dengan Usia produktif memiliki definisi golongan penduduk dengan usia matang untuk bekerja.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Guna mengetahui jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut:

Diagram 2.3: Jumlah Penduduk Menurut Agama

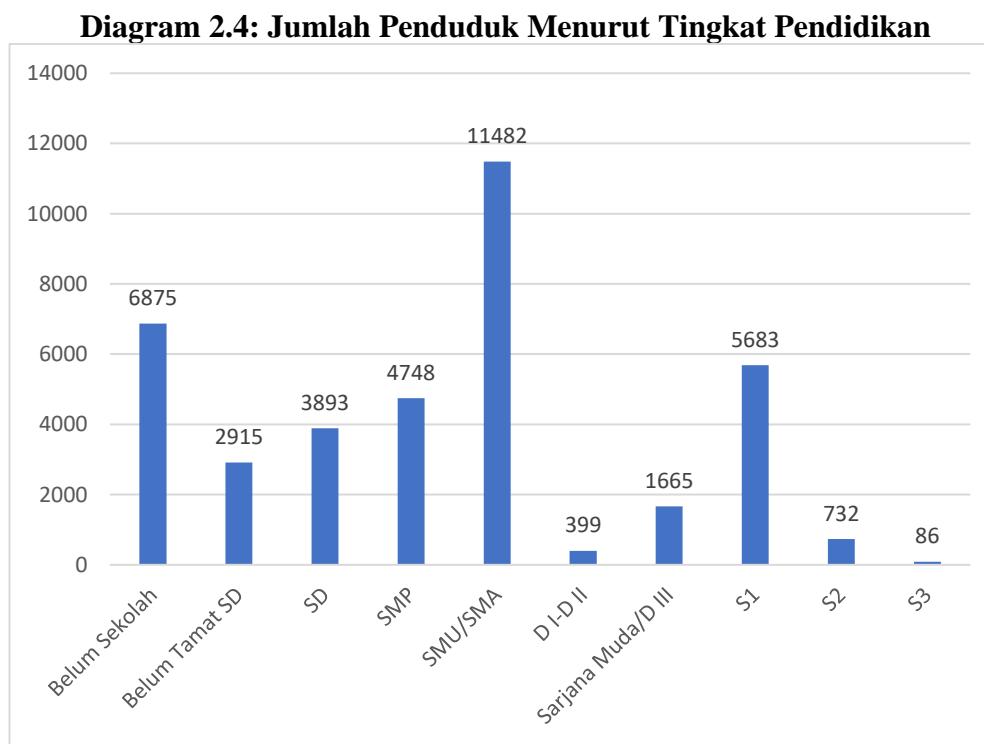


Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan Tahun 2022-2028

Dapat dilihat Diagram diatas Kalurahan Banguntapan penduduk berjumlah sebanyak 38.476 Jiwa. Dengan agama yang dianut masyarakat Kalurahan Bangunapan terbagi enam (6) kepercayaan yaitu agama Islam menjadi mayoritas yang dianut sebanyak 33.429 Jiwa, seterusnya penganut Agama Katolik sebanyak 2.739 Jiwa, diikuti penganut Agama Kristen Protestan sebanyak 1.063 Jiwa, serta diikuti agama Hindu sebanyak 418 Jiwa, selanjutnya diikuti Budha sebanyak 24 Jiwa, dan paling sedikit penganut Agama Khonghucu sebanyak 3 Jiwa. Artinya, walaupun mayoritas agama Islam yang paling banyak, tetapi masyarakat Kalurahan Banguntapan saling menciptakan hidup toleransi sesama umat beragama serta saling mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama.

5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Diagram di bawah ini menggambarkan jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan tingkat pendidikannya:



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Dapat dilihat pada Diagram diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kalurahan Banguntapan bervariasi yang dimulai dari belum sekolah sampai SMA yang mana penduduk dengan tingkat Pendidikan sekolah dasar lebih banyak dibandingkan dengan yang lain sebanyak 3.893 Jiwa dan tingkatan pendidikan SMA/SMK juga memiliki jumlah yang cukup banyak sebanyak 11.482 Jiwa. Namun, pendidikan dengan tingkat Pascasarjana/S3 memiliki jumlah paling sedikit yaitu 86 Jiwa saja. Terlepas dari itu, apabila dilihat dari tingkatan pendidikan penduduk

Kalurahan Banguntapan bisa disimpulkan masih mempunyai tingkat pendidikan yang tergolong cukup baik.

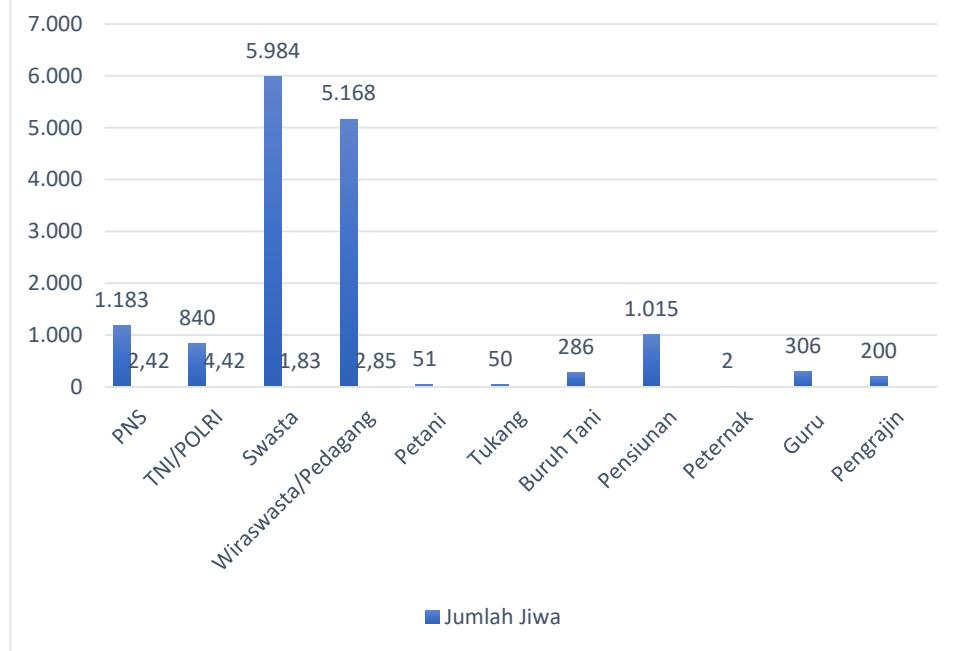
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Kalurahan. Melalui pendidikan, penduduk Kalurahan dapat memperoleh akses ke informasi tentang kesehatan sanitasi, gizi, dan praktik- praktik penting lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan yang baik, individu di desa dapat mengembangkan potensi mereka secara penuh, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam Pembangunan ekonomi dan sosial desa mereka.

Oleh itu, Kalurahan Banguntapan bisa mendorong masyarakatnya dapat mengakses pendidikan yang mana dapat membuat mereka bisa melakukan transformasi pada kehidupan sosial mereka. Dikarenakan masih banyak anak -anak muda lulusan SMA/SMK lebih memilih untuk langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi.

6. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Pada dasarnya semua memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah mata pencaharian di Kalurahan Banguntapan.

Diagram 2.5: Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Dari data diatas menunjukan bahwa hampir sebagian besar masyarakat Kalurahan Banguntapan yang paling banyak adalah Swasta sebanyak 5.984 Orang. Selanjutnya disusul dengan mata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang dengan jumlah penduduk sebesar 5.168 orang. Sedangkan yang menempati posisi ketiga adalah penduduk yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah penduduk sebesar 1.183 orang. Selebihnya yaitu ada yang bekerja sebagai pensiunan dengan jumlah 1.015 orang, TNI/Polri dengan jumlah 840 orang, guru dengan jumlah 306 orang, buruh tani dengan jumlah 286 orang, pengrajin dengan jumlah 200 orang, petani dengan jumlah 51 orang, tukang dengan jumlah 50 orang, seniman dengan jumlah 15 orang dan yang terakhir dan yang paling sedikit yaitu penduduk yang bekerja sebagai peternak dengan jumlah hanya 2 orang. Dapat dikatakan bahwa terdapat

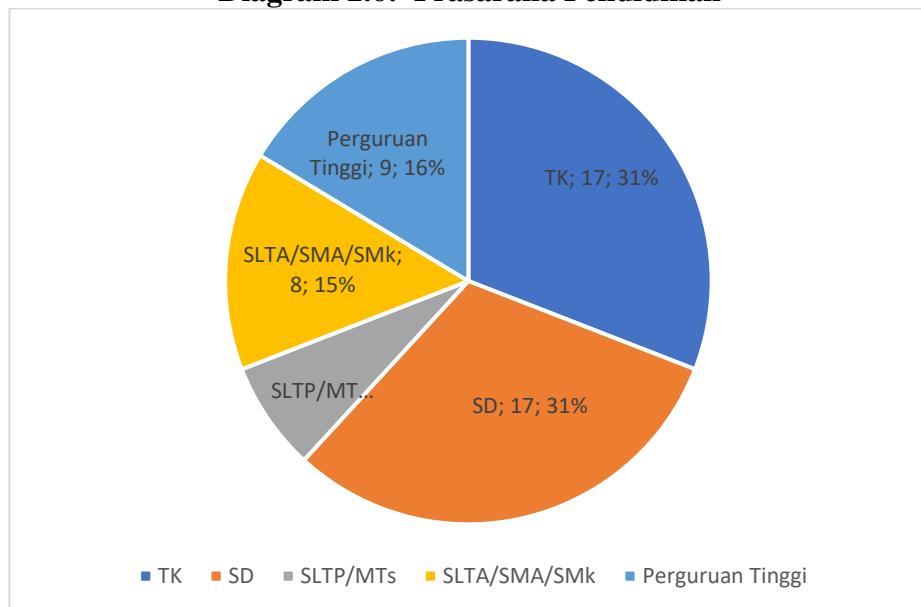
jenis mata pencaharian yang beragam yang ada di Kalurahan Sriharjo. Pekerjaan diatas dapat membuat masyarakat bisa menghidupi keluarganya, namun dibutuhkan juga inovasi dari pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan yang bisa menampung tenaga kerja bagi masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan mereka sehingga masyarakat bisa berwiraswasta.

D. Sarana dan Prasarana Kalurahan

1. Prasarana Pendidikan

Prasarana Pendidikan merupakan kebutuhan bagi masyarakat di bidang pendidikan. Tersedianya prasarana pendidikan akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berikut diagram jumlah prasarana pendidikan di Kalurahan Banguntapan.

Diagram 2.6: Prasarana Pendidikan

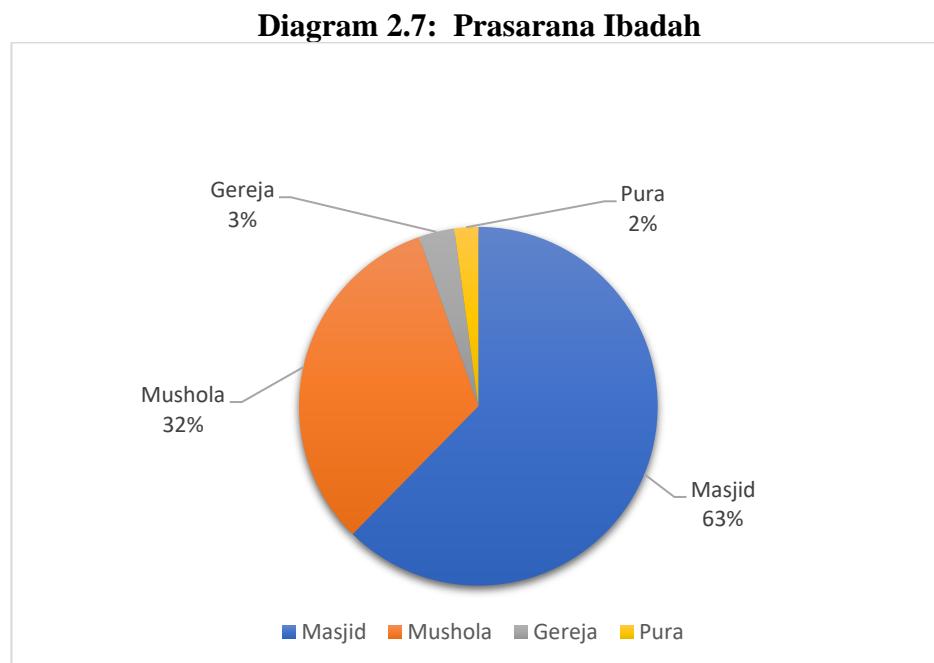


Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Dilihat dari tabel diatas, tentang prasarana Pendidikan di Kalurahan Banguntapan bisa dibilang cukup memadai dikarenakan tersedianya prasarana dari Tingkat Pendidikan PAUD sampai SMP yang mana bisa dengan mudah menjangkaunya, bahkan untuk kategori SD di Kalurahan sudah cukup bagus.

2. Prasarana Ibadah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang mana menjelaskan mengenai tentang hak kebebasan untuk menjalankan perintah agama. Berikut table yang menunjukkan jumlah prasarana ibadah di Kalurahan Banguntapan.



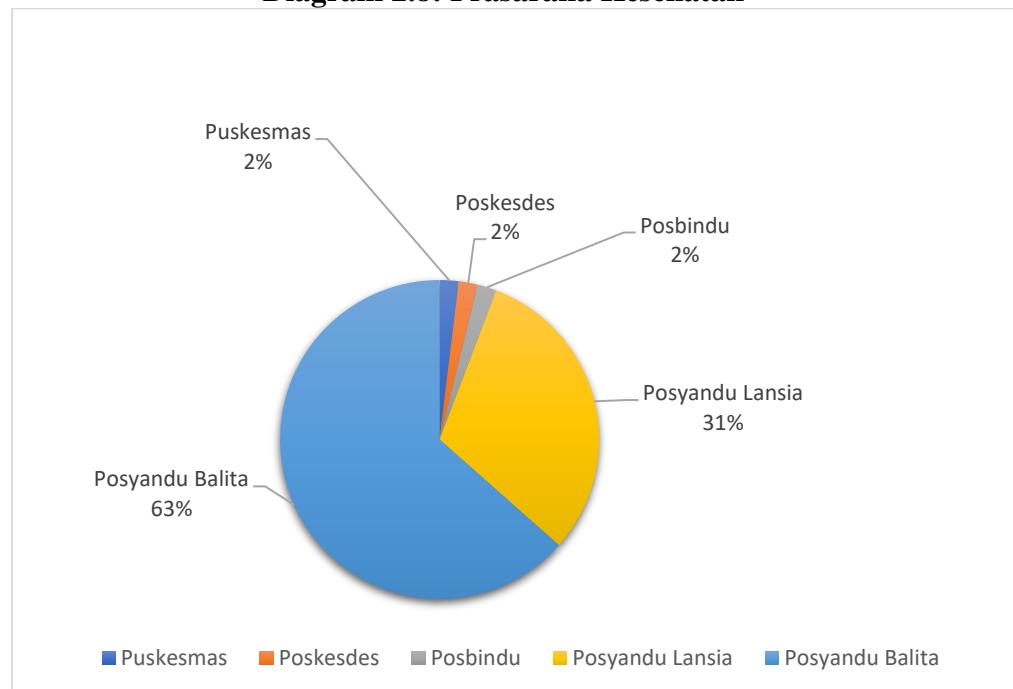
Dapat dilihat di atas Kalurahan Banguntapan memiliki beberapa tempat ibadah yang cukup memadai yang terdiri dari masjid sebanyak 58

bangunan beserta mushola 30 bangunan, sedangkan agama Katolik dan Kristen Protestan juga memiliki 3 bangunan gereja yang cukup besar untuk melakukan ibadah. Maka kalau agama Khonghucu, Hindu dan Budha juga memiliki 2 Pura yang menjadi tempat ibadah. Sehingga tidak perlu jauh-jauh melakukan ibadah dengan keyakinan masing-masing.

3. Prasarana Kesehatan

Berikut merupakan tabel yang akan menunjukkan jumlah prasarana kesehatan yang berada di Kalurahan Banguntapan.

Diagram 2.8: Prasarana Kesehatan



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Banguntapan telah tersedia prasarana kesehatan yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah posyandu balita 33 unit, seterusnya posyandu lansia 16 unit, seterusnya Poskesdes 1 Unit, seterusnya Posbindu 1 Unit

dan Puskesmas 1 Unit. Maka dengan tersedianya segala prasarana dapat membantu masyarakat dan meminimalisir terjadinya gizi buruk dan angka kematian anak. Serta memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang mudah.

4. Prasarana Umum

Berikut jumlah prasarana umum yang berada di Kalurahan Banguntapan

- a. Lapangan Sepakbola yang berada di Kalurahan Banguntapan terdapat 1 (Satu) Unit, yang terletak di Padukuhan Jomblangan Kalurahan Banguntapan.
- b. Lapangan Bulutangkis yang berada di Kalurahan Banguntapan terdapat 11 (Sebelas) Unit, yang terdiri dari 6 (Enam) Unit milik warga Nonprofit, selanjutnya 4 (Empat) Unit milik pengusaha Profit dan, 1 (Satu) Unit Milik Kalurahan Banguntapan.
- c. Lapangan Bola Volly yang berada di Kalurahan Banguntapan terdapat 11 (Sebelas) Unit yang tersebar disetiap Padukuhan yang ada di Kalurahan Banguntapan.
- d. Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kalurahan Banguntapan terdapat 5 (Lima) Lokasi, lokasi pertama terletak di Padukuhan Jomblangan, lokasi kedua terletak di Padukuhan Jaranan, lokasi ketiga terletak di Padukuhan Wonocatur, lokasi keempat di Padukuhan Karangjambe dan, lokasi kelima di Padukuhan Tegal Tanda.

- e. Gedung Pertemuan yang berada di Kalurahan Banguntapan terdapat 12 (Dua Belas) Lokasi tersebar di setiap 11 Padukuhan dan, 1 (Satu) unit yang teletak di Kantor Kalurahan Banguntapan.
- f. Makam Kalurahan yang berada di Kalurahan Banguntapan terdapat 2 (Dua) Lokasi, 1 (Satu) Unit Makam Sorowojo terletak di Padukuhan Sorowajan dan, 1 (Satu) Unit Makam Sasono Loyo Sambirejo di Padukuhan Jaranan.

E. Potensi Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam yang ada di kalurahaan Banguntapan sangat mendukung baik dari segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Potensi ekonomi ini menggambarkan tentang kemampuan ekonomi di wilayah Kalurahan Banguntapan yang bisa di kembangkan dan bisa menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah Kalurahan maupun masyarakat Banguntapan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, berkurang dari Rp. 8.453.062.590,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi Rp. 7.960.302.241,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut

Disamping itu, sumber pendapatan ekonomi Kalurahan Banguntapan berasal dari pengelolaan potensi Kalurahan, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

Daerah, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan lainnya. Berikut adalah penjelasannya.

a. Pengelolaan Potensi Kalurahan

Pendapatan ini terdiri dari hasil kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan yaitu:

- Tanah Kas Desa

Gambar 2.1: Tanah Kas Kalurahan



Sumber: Data Lapangan Penelitian 2025

Tanah kas desa yang ada di Kalurahan Banguntapan ini bentuknya berupa lahan kosong dan lahan pertanian yang memultifungsikan oleh Masyarakat untuk lahan pertanian serta untuk di sewakan kepada para investor. Harga sewah khusus masyarakat Kalurahan Banguntapan Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) per tahun. Sedangkan untuk sewah kepada Investor Rp. 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) selama 5-20 Tahun.

- Sewa Kios

Gambar 2.2: Sewa Kios Kalurahan



Sumber: Data Lapangan Peneliti 2025

Sewa kios ini letaknya di Padukuhan Jomblangan, Parangbendo dan Modalan yang dibangun oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan yang di sewa oleh masyarakat dijadikan tempat usaha-usaha. Untuk harga sewa kios yang setiap Los berukuran 2x3 meter dengan harga sewa Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu) di Padukuhan Jomblangan, sedangkan di padukuhan Parangbendo dengan harga sewa Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) pertahun, dan di Padukuahn Modalan dengan harga Sewa Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pertahun. Bahwa secara spesifik ruko/kios ini hanya di sewakan pada warga Padukuhan Jomlangan, Parangbendo, dan Modalan dengan tujuan memberdayakan warga setempat supaya mereka dapat mengembangkan usaha-usaha yang sudah ada di tempat mereka. Dalam penyewaan kios bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan Kalurahan.

- Sewa Gedung

Gambar 2.3: Aula/Gedung Serbaguna



Sumber: data lapangan Peneliti 2025

Dalam hal sewa Gedung multifungsi yang ada di Kalurahan Banguntapan menjadi salah satu pendapatan Kalurahan dalam proses sewa Gedung pernikahan sebesar Rp. 3.000.00 (Tiga Juta Rupiah) dan sewa lapangan olahraga yaitu badminton perbulan sebesar Rp. 150.000-Rp. 300.000. Dengan adanya Aula/Gedung ini menjadi salah satu Pendapatan Asli Kalurahan.

- Sebagian dari hasil pajak daerah Kalurahan dan retribusi kabupaten dialokasikan untuk kalurahan. yang merupakan bagian untuk setiap Kalurahan secara proporsional.
- Bagian dari dana perimbangan kuangan pusat daerah yang diberikan oleh kabupaten untuk setiap kalurahan, yang dibagi secara proporsional untuk setiap kalurahan dan dana kalurahan.

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Adapun Jenis Tindakan dan fasilitas ekonomi yang ada dikalurahan Banguntapan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1: Tempat Usaha dan Perdagangan

No	Jenis Tempat	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Pasar Kalurahan	1	Unit
2.	SuperMarket	12	Unit
3.	Toko	66	Unit
4.	Warung kelontong, sayuran	300	Unit
5.	Rumah Makan/Café	36	Unit
6.	Warung Bakmi, Gudeg, Sate, Bakso, Soto	73	Unit
7.	Angkringan	112	Unit
8.	Gerobag Dorong	5	Unit

Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa Jenis usaha dan fasilitas ekonomi yang ada di Kalurahan Banguntapan antara lain jenis tempat yang banyak Usaha Warung Kelontong 300 Unit, jenis tempat Usaha Angkringan 112 Unit, Usaha Warung Bakmi, Gudeg, Sate, Bakso, Soto 73 Unit, selanjutnya Jenis tempat Usaha Toko 66 Unit, Usaha Rumah Makan/Café 36 Unit, Usaha Supermarket 12 Unit, jenis Usaha Gerobak Dorong 5 Unit, dan memiliki Pasar Tradisional 1 Unit. Maka dari penjelasan diatas ini bahwa Pemerintah Kalurahan memiliki jenis tempat Usaha yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan Banguntapan.

F. Pemerintah Kalurahan Banguntapan

1. Visi dan Misi

Menurut dari rumusan Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Banguntapan yaitu:

a. Visi

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Jujur, Inovatif, Transparan dan Akuntabel demi terciptanya Kalurahan Banguntapan yang maju berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhineka Tunggal Ika”

- 1) **Bersih** dalam arti pemerintahan yang tulus dan ikhlas.
- 2) **Jujur** dalam arti pemerintahan yang selalu dilandasi dengan nilai-nilai keterbukaan sesuai dengan norma agama dan norma yang ada berlaku di masyarakat.
- 3) **Inovatif** dalam arti setiap kegiatan dan program kerja diharapkan selalu mengikuti perkembangan yang ada.
- 4) **Transparan** dalam arti setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- 5) **Akuntabel** dalam arti setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh baik oleh pengawas dari instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

b. Misi

Penjabaran dari Misi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi

lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kalurahan selama masa jabatan Lurah Banguntapan. Misi Kalurahan Banguntapan adalah:

- 1) Memberikan pelayanan masyarakat yang baik secara efektif dan efisien dengan pelayanan elektronik.
- 2) Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berbudaya.
- 3) Penataan kawasan permukiman dan pengelolaan sampah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat
- 4) Mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata kalurahan Banguntapan.
- 5) Mengembangkan dan meningkatkan potensi BUM Kal berbasis ekonomi kerakyatan.
- 6) Pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi warga usia lanjut (Jompo)
- 7) Pembinaan bagi siswa berprestasi dan anak yatim piatu.
- 8) Pembinaan pemuda dan UMKM melalui berbagai pelatihan keterampilan

2. Bidang Pemerintahan Kalurahan

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 bahwa di dalam Kalurahan terdapat tiga kelembagaan Kalurahan yang memiliki peran penting dalam tata kelola Kalurahan, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan

Permusyawaratan Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Kalurahan (Pemerintahan Kalurahan) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pemerintahan Kalurahan dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Tabel 2.2: Struktur Pemerintah Kalurahan Banguntapan

No	Nama	Jabatan
1	Basirudin	Lurah
2	Nunung Yulianto, S.Pd	Carik
3	Noviara Aji Saputra St	Jagabaya
4	Priyo Noerendro, Se.	Ulu-ulu
5	Isnan Nur Alfian	Kamituwa
6	Drs. Endro Suryono	Kaur Danarta
7	Suharjono, Se	Kaur Tatalaksana
8	Fitriyadi Wahyono	Kaur Pangripta
9	Madiyono	Dukuh I Tegal Tandan
10	Arwan Ngakib A.Md. Farm	Dukuh II Jaranan
11	Sigit Danang H, St.	Dukuh III Jomblangan
12	Irfan Agus Prasetya	Dukuh IV Wonocatur
13	H. Herguswanto	Dukuh V Karangjambe
14	Siti S. Banun, Se	Dukuh VI Karangbendo
15	M. Ridwan Novalino	Dukuh VII Sorowajan
16	Aris Purnomo	Dukuh VIII Plumbon
17	Afid Sulaksono	Dukuh IX Pelem Wulung
18	Bambang Wisnu K	Dukuh X Pringgolayan
19	Joko Danang K,Sh.	Dukuh XI Modalan

20	Sumarno, Sip	Staf Pamong Kalurahan
21	Trigino	Staf Pamong Kalurahan
22	Hery Kiswanto	Staf Pamong Kalurahan
23	Walidi	Staf Pamong Kalurahan
24	Slamet Ibnu Sudarpo	Staf Pamong Kalurahan
25	Suratno	Staf Pamong Kalurahan
26	Agus Tri Wahono	Staf Pamong Kalurahan
27	Zainudin	Staf Pamong Kalurahan
28	Affan Achmadi St	Staf Honorer Kalurahan
29	Dimas Anggoro Putra	Staf Honorer Kalurahan
30	Ristiyanto Amd	Staf Honorer Kalurahan

Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022-2028

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul No 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan, kinerja Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah sebagai pemimpin kalurahan berkewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan dibantu oleh Pamong Kalurahan.
2. Carik sebagai sekretaris Kalurahan berkewenangan dalam membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan
3. Urusan Tata Usaha dan Umum yatau dikatakan sebagai Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
4. Urusan Tata Keuangan atau Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
5. Urusan Tata Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.

6. Seksi Keamanan atau disebut sebagai Seksi Pemerintahan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
7. Seksi Kemakmuran atau Seksi pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
8. Seksi Sosial atau disebut sebagai Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
9. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuh.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Desa bertugas menetapkan anggaran dasar desa bersama-sama dengan Kepala Desa dan menyambut serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil masyarakat desa berdasarkan keterwakilan daerah yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat. Anggota Bamuskal meliputi tokoh agama dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya. Susunan organisasi Badan Permusyawaratan Banguntapan terdiri atas seorang Presiden, seorang Wakil Presiden, seorang Sekretaris, seorang Presiden Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, seorang Presiden Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan serta empat orang anggota.

Berikut kami sajikan sarana dan prasarana dan perangkat hukum sebagai penunjang Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan

No.	Nama Sarpras	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor	I Unit	Termasuk untuk pelayanan satu atap
2.	Ruang Rapat	I Unit	
3.	Aula/Gedung Pertemuan	I Unit	
4.	Perpustakaan	I Unit	
5.	Mushola	I Unit	
6.	Sarana Teknologi/Informasi	I Unit	
7.	Tempat Parkir Kendaraan	I Unit	

Sumber; RPJM Kalurahan Banguntapan 2022

Berdasarkan dari tabel diatas, bahwa sarana dan prasarana Pemerintahan Kalurahan Banguntapan memiliki 7 Unit. Dimana Kantor Pemerintah Kalurahan 1 Unit, Ruang Rapat 1 Unit, Aula/Gedung Pertemuan 1 Unit, Perpustakaan 1 Unit, Mushola 1 Unit, Sarana Teknologi/Informasi 1 Unit, selanjutnya Tempat Parkir Kendaraan 1 Unit. Sarana dan prasarana Pemerintahan Kalurahan ini termasuk dalam pelayanan satu atap yang dimiliki.

3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

1) Prasarana dan Sarana Kalurahan

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu

menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan;
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan;
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan;
4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

Berikut kami sajikan kondisi sarana dan prasarana saat ini di Bidang pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sebagai berikut :

1. Prasarana Pengelolaan Sampah Kalurahan Banguntapan

Gambar 2.4: Tempat Penampungan Sampah Terpadu 3R



Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti 2025

Berdasarkan data bahwa prasarana pengelolaan sampah TPST 3R memiliki sebanyak 1 Unit yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan yang berlokasi di Padukuhan Modalan

2. Wahana Rekreasi dan Wisata

Gambar 2.5: Wisata Gua Seluman



Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti 2025

Gambar 2.6: Wisata Embung di Padukuhan Sorowajan



Sumber: Dokumentasi Lapangan Peneliti 2025

Wahana rekreasi wisata yang dimiliki Kalurahan Banguntapan terdapat 3 (Tiga) Unit, 1 (Satu) unit wisata embung yang berlokasi di Padukuhan Sorowajan, 1 (Satu) Unit Wisata Religi/Peninggalan Sejarah dan, 1 (Satu) Unit Wisata Mata Air yang berlokasi di Padukuhan Wonocatur.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan mengurus program dan kegiatan meliputi :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Secara teknis bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan diampu oleh :

1. Kepala Seksi Keamanan (Jagabaya)
2. Kepala Seksi Kesra (Kamituwa)
3. Kepala Seksi Ekobang (Ulu-ulu)

Mata pencaharian penduduk Banguntapan beragam dan petani, PNS, kuli bangunan serta pegawai swasta menjadi mayoritas mata pencaharian penduduk di Banguntapan. Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Banguntapan masih tinggi dibuktikan dengan jumlah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Banguntapan sebanyak 6.771 orang.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mengurus program dan kegiatan meliputi:

1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan;

4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Secara teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diampu oleh:

1. Kepala Seksi Keamanan (Jagabaya)
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan (Ulu-ulu)
 3. Kepala Seksi Pelayanan (Kamituwa)
- a. Kelompok Kesenian Kalurahan

Tabel 2.4: Kelompok Kesenian Kalurahan

No.	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Kelompok Karawitan	8	Kelompok
2.	Sanggar Kesenian Jawa	2	Kelompok
3.	Bregodo	4	Kelompok

Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa kelompok Kesenian Kalurahan Banguntapan memiliki Kelompok Karawitan sebanyak 8 Kelompok, selanjutnya Brego sebanyak 4 Kelompok, dan Sanggar Kesenian Jawa sebanyak 2 Kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruhnya 14 kelompok kesenian yang ada di kalurahan ini menjadi wadah/tempat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya dapat kembangkan oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.

b. Kelompok Pertanian dan Peternakan

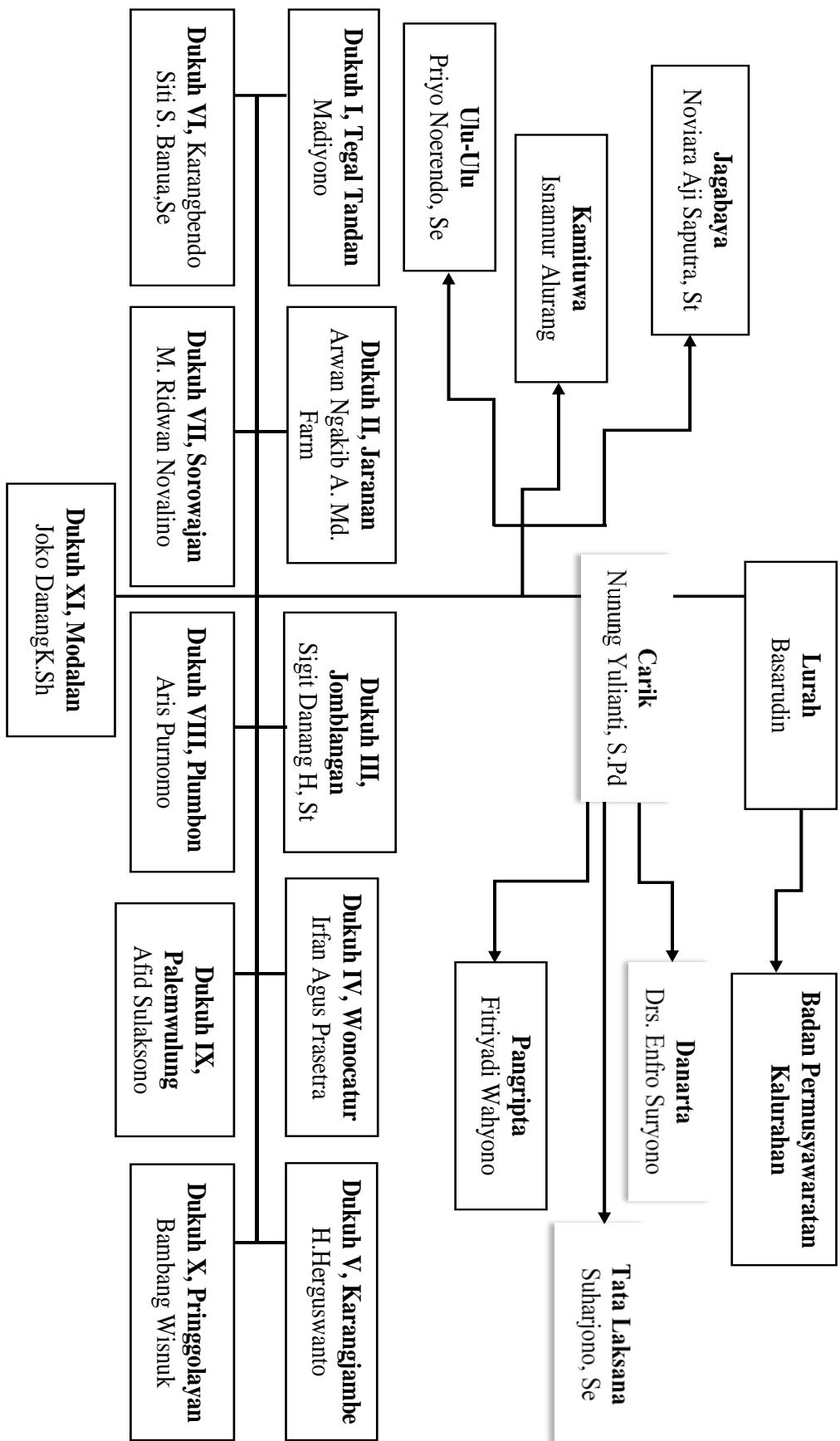
Tabel 2.5: Kelompok Pertanian dan Peternakan

No.	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Kelompok Tani	4	Kelompok
2.	Kelompok Tanam/Pangan	8	Kelompok
3.	Kelompok Peternak	9	Kelompok
4.	Kelompok Perikanan	23	Kelompok

Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa kelompok pertanian dan Peternakan yang dimiliki Kalurahan Banguntapan Kelompok Perikanan sebanyak 23 Kelompok, diikuti kelompok Peternakan sebanyak 9 Kelompok, kelompok Tanam/Pangan sebanyak 8 Kelompok, dan kelompok Tani sebanyak 4 Kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh kelompok pertanian dan peternakan sebanyak 44 Kelompok yang ada di Kalurahan Banguntapan

Gambar 2.4: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan



Sumber: RPJM Kalurahan Banguntapan 2022

Berikut deskripsi dari susunan organisasi Pemerintah Kalurahan, fungsi dan sebutan nama jabatan; sebutan nama jabatan lurah setara jabatan Kades yang berfungsi sebagai kepala Pemerintahan Kalurahan/desa. Selanjutnya sebutan nama jabatan carik sama setara jabatan sekdes berfungsi yang membantu lurah/kades dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan Kalurahan/desa. Selanjutnya sebutan nama jabatan BPKalurahan sama dengan jabatan BPD berfungsi sebagai perwakilan masyarakat desa dalam mengambil keputusan dan mengawasi kegiatan pemerintahan kalurahan/desa. Selanjutnya kalau sebutan jabatan Danarta kalau di Pemerintahan desa sebagai bendahara keuangan, selanjutnya jabatan Ulu-ulu sama dengan jabatan seksi kesejahteraan. sedangkan jabatan kamituwo/dukuh setara jabatan kepala dusun. Maka dapat disimpulkan bahwa penjelasan dari setiap nama jabatan memiliki arti yang sama.

BAB III

INOVASI DALAM PENGUATAN PEMERINTAH KALURAHAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN POTENSI KALURAHAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil temuan selama dilapangan, yakni terkait **“Inovasi Dalam Penguatan Pemerintah Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi (Studi Kasus di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Peneliti akan mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai proses Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam pengutuhan Pemerintah Kalurahan untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan. Hasil penelitian juga didasari pada fokus penelitian dan temuan yang ada dilapangan yang disajikan dengan data secara jelas dan terperinci yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sesudah selesai melakukan penelitian serta mengumpulkan data-data dari informasi yang relevan sesuai dengan batasan penelitian, oleh karena itu peneliti akan menganalisis data tersebut. Dalam tujuannya adalah merangkum informasi tersebut sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengeksplorasi Inovasi Dalam Penguatan Pemerintah Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Inovasi ini mencakup bagaimana proses Kualitas Sumber Daya Manusia, Potensi Sumber Daya Alam, Kelembagan Kalurahan, Partisipasi Masyarakat, Serta Kinerja Pemerintah, serta pemanfaatan bagi Pemerintah Kalurahan Banguntapan sebagai penyelenggara Inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan. Beserta demikian untuk memahami lebih lanjut dari hasil penelitian, maka dari itu peneliti akan memfokuskan pada Tiga sub bab seperti berikut:

A. Kualitas Sumber Daya Yang Dimiliki Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas merupakan faktor penting dalam mendukung berbagai program pembangunan desa, termasuk yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Pemerintah Kalurahan memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah kalurahan.

Untuk melihat kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan pendapatan asli Kalurahan. Maka peneliti melakukan wawancara bersama Basirudin selaku Lurah Banguntapan.

“Sumber daya manusia disini sudah mamadai, akan tetapi yang menjadi kendala bagi kami pemerintah Kalurahan, anak-anak muda sekarang setelah lulus mencari jati diri dengan berkarir di luar Banguntapan. Dan kalau sudah berkarir Kembali lagi ikut

berpartisipasi dalam program yang dimiliki Kalurahan seperti kegiatan sosialisasi, dan pendampingan yang ada di Banguntapan. sedangkan dalam perekrutan perangkat desa, kami Pemerintah lebih memanfaatkan sumber daya manusia yang berakademis yang ada di Kalurahan Banguntapan “(24 Desember 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Basirudin selaku Lurah Kalurahan Banguntapan menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kalurahan sudah memadai. Akan tetapi pemuda-pemudi Kalurahan Banguntapan lebih memilih bekerja di luar Kalurahan Banguntapan. Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang dilakukan Pemerintahan Kalurahan dengan cara meningkatkan akses kualitas pendidikan, kemampuan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan peningkatan kapasitas lembaga contohnya peningkatan kapsitas BUMKal dan Karang Taruna dan pelatihan peningkatan pangan, contohnya pelatihan masak. hal ini dapat membantu warga meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Supaya Meningkatkan kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi Kalurahan dan dapat membuka peluang bagi warga Kalurahan untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka maka serta membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Suratno selaku staf Pamong yang menyatakan:

“Sumber daya manusia yang ada di Kalurahan sudah meningkat dan sudah banyak yang yang lulusan di perguruan tinggi. Sedangkan perangkat desa yang ada di Kalurahan Banguntapan rata-rata pegawainya sudah pada lulusan sarjana dan masyarakat juga banyak yang memiliki potensi dengan kemampuan yang dimiliki dalam berwirausaha, karena pemerintah memberikan

pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat.” (24 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Suratno selaku staf pamong Kalurahan Banguntapan, bahwa Pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam berinovasi sumber daya manusianya sudah sangat memadai. Dengan adanya sumber daya manusia pemerintah Kalurahan dapat memberikan pelatihan dan pendampingan yang dapat di manfaatkan masyarakat dalam berwirausaha untuk dikembangkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Priyo Noerendro selaku Ulu-Ulu Kasih Kesejahteraan Masyarakat yang menyatakan:

“Disini tugas kami selaku Ulu-ulu dan bersama Pemerintah Kalurahan kalau mengenai sumber daya manusia yang menjadi utama dalam pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat, karena pengaruhnya sangat besar, bagi Kalurahan Banguntapan karena prioritas yang paling utama untuk kemajuan Kalurahan. Sehingga dalam peningkatan kualitas makin baik serta cara pengelolaan dan memanfaatkan potensi yang ada pasti akan optimal Ketika di Kelola potensi kalurahan dengan baik.” (04 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Priyo Noerendro selaku ulu-ulu kasih pelayanan kesejahteraan Kalurahan Banguntapan mengatakan kedepannya inventarisasi, membenahi ulang program dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Kalurahan Banguapan.

Dari pernyataan ketiga Informan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia sudah sangat memadai dalam berinovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat signifikan dalam

kemajuan pemerintah Kalurahan. Mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan adalah upaya untuk menjadikan Kalurahan sebagai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui kesiapan SDM yang memadai mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Kalurahan.

2. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang di Kalurahan Banguntapan. Masih banyak yang belum di optimalkan serta di Kelola dengan baik, Dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki seperti lahan pertanian, wisata embung, peninggalan sejarah dan mata air. Dengan inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, supaya bisa meningkatkan serta penting diingat bahwa pengelolaan potensi yang ada bisa memberikan dampak memenuhi ekonomi masyarakat dan Kalurahan. Dengan ini maka sekaligus pelestarian lingkungan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai potensi sumber daya alam yang mengoptimalk pengelolaan potensi kalurahan peneliti telah melakukan wawancara bersama Nunung Yuhanto selaku Carik Kalurahan Banguntapan yang mengatakan :

“Saat ini kami melihat potensi yang ada di kalurahan sudah mulai dalam pengoptimalan . Dan dioptimalkan untuk dikelola, seperti menyewa tanah kas kalurahan yang digunakan untuk lahan pertanian dan disewakan ruko, kios, atau tempat usaha lainnya. Ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Kuliner, minimarket, laundry, bengkel, dan bisnis lain yang dibutuhkan warga. Selain itu, Kalurahan memiliki mata air, embung, dan Gua Seluman yang hanya bangunan fisiknya dan perawatan saja. Ada juga gedung

multifungsi atau ruang publik, dan fasilitas olahraga. Dan tanah kas disewakan oleh kepada para investor.” (11 Desember 2024)”.

Berdasar hasil wawancara dari Nunung Yuhanto selaku carik di Kalurahan banguntapan menyatakan bahwa pengelolaan potensi sumber daya alam seperti mata Air, Embung, dan Gua Silunman masih bangunan fisik dan perawatan. pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang sekarang sudah tanah kas kalurahan, ruko, dan Gedung serbaguna yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan Kalurahan.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Sigit Danan Herju selaku dukuh di jomblangan yang mengatakan :

“Masyarakat yang ada di padukuhan jomblangan ini. kami menyewa tanah kas desa untuk dijadikan lahan pertanian untuk menanam padi dan sayuran dan lain- lain. Selain itu tanah kas desa disewakan kepada masyarakat untuk dijadikan tempat berwirausaha yaitu kios dan warung yang disewakan oleh pemerintah Kalurahan kepada masyarakat. Maka dari sewa tanah kas ini menjadi salah satu sumber daya alam yang sudah optimal dalam pengelolaannya untuk kalurahan dan masyarakat. “(24 Desember 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sigit Danan Herju selaku dukuh jomblangan yang menyatakan bahwa mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan dari tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakat dan invenstor untuk dijadikan tempat pertanian dan wirausaha. Potensi kalurahan masih ada dikelola dengan sepenuhnya masih dalam bentuk bangunan fisik dan perwatan saja. Dari potensi yang belum selesai seratus persen ini menjadi salah satu program yang ditata ulang oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan yang harus di selesaikan sepenuhnya supaya pengelolaan yang

baik meberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Banguntapa.

Dari pernyataan kedua informan diatas maka ditarik kesimpulan bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang masih belum difungsikan dengan baik akan menjadi prioritas program Pemerintah Kalurahan. Yaitu mata Air, embung, dan Gua Seluman memiliki potensi yang belum dikelola dengan sepenuhnya. Dengan mengelola potensi Kalurahan yang ada dapat memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih beragam. Dan dari sektor pertanian dalam penyewaan tanah kas dapat untuk lahan pertanian lokal dan meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat. Dan dari segi pengembangan usaha dalam kemudahan akses membuka peluang untuk mengembangkan kawasan komersial seperti ruko, kios, dan tempat usaha lainnya ini bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalurahan, dan menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat Kalurahan.

B. Kinerja Kelembagaan Pemerintah Kalurahan Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan

1. Kinerja Kelembagaan Pemerintah Kalurahan

Kelembagaan dalam Pemerintah Kalurahan secara keseluruhan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk Inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan, ini mencakup Lurah memimpin dan mengkoordinasi upaya

peningkatan pendapatan ekonomi. Perangkat Kalurahan melaksanakan tugas-tugas administrastratif dan teknis terkait pengelolaan keuangan dan potensi kalurahan. Pemerintah Kalurahan memiliki Lembaga Bamuskal (badan permusyawaratan Kalurahan) dan masyarakat untuk membahas dan menetapkan kebijakan terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan dan potensi kalurahan serta memiliki fungsi pengawasan terhadap penguatan Pemerintah Kalurahan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelembagaan yang ada di Kalurahan Banguntapan dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan. Maka peneliti melakukan wawancara bersama Wiyadi selaku Ketua Bamuskal mengatakan:

“Lembaga yang ada disini khususnya Bamuskal sangat berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan kami juga sangat mendukung inovasi/program pemerintah Kalurahan yang ada, dengan mengadakan pelatihan pemberdayaan masyarakat serta mengevaluasi kinerja pemerintahan itu salah satu program yang harus terus menerus untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam supaya mendorong setiap lembaga yang ada di Kalurahan banguntapan saling bersinergitas. “(10 Desember 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Wiyadi selaku ketua Bmuskal Kalurahan banguntapan bahwa dalam ini perlu adanya pengawasan dan pengoptimalan dalam kinerja pemerintah Kalurahan untuk pengelolaan potensi kalurahan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelembagaan yang ada di Pemerintahan Kalurahan Banguntapan dalam penguatan untuk

mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan. Maka peneliti melakukan wawancara Bersama Nunung Yulianto selaku Carik:

“Untuk penguatan kelembagaan Kalurahan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pamong yaitu (pawiyahan) mulai dari tupoksinya dan cara bersikap dan kemudian dari cara menyelesaikan perkara. Dan dalam meningkatkan kelembagaan Kalurahan juga memiliki peningkatan kapasitas (BUMKal) Karang taruna dan pelatihan Masyarakat. Untuk mengadakan pelatihan satu kali setahun. “(11 Desember 2025)”.

Dari pernyataan informan di atas dapat ditarik kesimpulan dengan adanya penguatan kelembagaan Kalurahan dapat bersinergitas dalam berinovasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Kalurahan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dengan kehadiran BUMKal (badan milik usaha Kalurahan) diharapkan dapat berkontribusi besar bagi pengelolaan potensi Kalurahan.

2. Kinerja Pemerintah Kalurahan

Perencanaan dalam inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan kelembagaan harus mampu mengetahui dan memetakan potensi-potensi yang ada di Kalurahan, baik sumber daya alam, dan sumber daya manusia, maupun potensi ekonomi lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Berdasarkan potensi, Pemerintah Kalurahan dalam menyusun rencana kerja yang terarah dan terstruktur untuk meningkatkan pengelolaan potensi yang baik. Rencana ini harus membuat target yang jelas, strategi pencapaian, serta alokasi anggaran yang

dibutuhkan. Pelatihan dan pendampingan dapat diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan.

Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan inovasi dalam penguatan Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan dan perkembangan kegiatan harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan Pengawasan dilakukan oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja pemerintah dalam penguatan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi peneliti melakukan wawancara dengan Hendro Suryono selaku Kaur Danarta/Keuangan yang mengatakan

“Berkaitan dengan ini, itulah pentingnya untuk memastikan bahwa inovasi/program yang ada harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dan pelaksanaan pengelolaan potensi kalurahan, Pemerintah harus mengelola potensi kalurahan secara efektif dan efisien. Potensi kalurahan dapat berupa tanah kas desa. dan bangunan, pasar Kalurahan dan SDA. Pengelolaan potensi ini dapat dilakukan dengan cara disewakan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau dikelola sendiri oleh desa. Pengembangan Usaha yang ada di Desa, Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pengembangan usaha-usaha produktif di desa, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal. “(13 Desember 2024)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Seryono selaku Kalur Danarta menyatakan bahwa program dari Kalurahan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam kinerja Pemerintahan Kalurahan

sebaiknya terlaksana supaya dapat meningkatkan pengelolaan, yang bekerja sama setiap struktural Kalurahan dan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja Pemerintah Kalurahan yang berkaitan inovasi dalam penguatan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan peneliti melakukan wawancara dengan Priyo Noerendro selaku Ulu-Ulu Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang mengatakan:

“Mungkin kedepannya bisa menyusun ulang program-program yang tidak terlaksana dengan penuh, inovasi/program yang belum selesai akan di teruskan kedepannya. Supaya kinerja pemerintah Kalurahan memberikan pengaruh besar dalam penguatan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan dari kinerja pemerintah yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “(04 Januari 2025)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Priyo Noerendro selaku ulu-ulu (kasih kesejahteraan masyarakat) semoga kedepannya pemerintahan Kalurahan bisa meningkat kinerja diberbagai lembaga yang ada di kalurahan. Salah satu bagian pentingnya dalam menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kinerja Pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan peneliti melakukan wawancara dengan Riska selaku masyarakat yang mengatakan:

“Saya melihat lumayan baik dari segi pelayanan dalam merespon masyarakat. Ketika ada program dari pemerintah kami selalu mendapat informasi dari pak dukuh dan pak RT yang dibagikan

lewat grub padukuhan masinng-masing. Untuk pengelolaan potensi yang dilakukan pemerintah kalurahan masih tanah kas kalurahan yang di sewakan, kalau potensi SDA yang lain masih bentuk bangunan saja. “(18 Januari 2025)”

Berdasarkan pernyataan ketiga informan diatas dapat ditarik kesimpulan dalam kinerja pemerintahan Kalurahan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan masih dari tanah kas kalurahan yang berjalan. maka BPKal memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kalurahan, termasuk dalam meningkatkan kapasitas kinerja pemerintahan dengan pelatihan peningkatan kapasitas BUMKAL. Upaya peningkatan Evaluasi dalam monitoring serta mendata ulang tanah kas Kalurahan yang belum terdata dan belum ada inovasi terbaru. Hal ini menjadi peroritas utama Pemerintah Kalurahan untuk meningkatkan kinerja, penguatan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan yang belum terselesaikan secara penuh. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik, Dengan kinerja yang baik, pemerintah kalurahan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Hasil Partisipasi Untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Kalurahan

Partisipasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Potensi Kalurahan masyarakat ikut aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Dengan mengadakan kegiatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat mengadakan pelatihan pangan, kelompok tani, dan kelompok perikanan, dan ada kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM). Atau

pengembangan potensi wisata desa. Keikutsertaan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara individu, tetapi juga berkontribusi pada PAKal dengan menyewa tanah milik Kalurahan. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam meningkatkan PAKal di Kalurahan Banguntapan. Serta kontribusi dalam pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi desa.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan. Peneliti melakukan wawancara dengan Nunung Yuhanto selaku Carik Kalurahan Banguntapan.

“Masyarakat disini cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada dikalurahan. Ketika ada pameran di kalurahan kita mengajak kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menjualkan produk serta ikut berkontribusi dalam program yang diakan Pemerintah Kalurahan. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama. Bentuk Partisipasi yang sekarang ini yang dilakukan pemerintah dan masyarakat salah satunya hanya menyewa tanah kas Kalurahan untuk dijadikan tempat, pertanian dan tempat usaha-usaha. (10 Desember 2024)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Carik Kalurahan Banguntapan dengan partisipasi yang aktif, maka dapat berkembang pada Pembangunan dan inovasi dapat berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan pemerintah Kalurahan harus memberikan kontribusi besar kepada masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan penelitian melakukan

wawancara dengan Priyo Noerendro selaku Ulu-Ulu. Kasih kesejahteraan, Priyo Noerendro.

“Kalau mengenai partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan sudah optimal masyarakat ikut terlibat, tetapi masih di butuhkan pendampingan, karena yang berperan penting sebetulnya Pamong yang bisa membantu Kalurahan dalam suatu program agar masyarakat ikut terlibat dalam program kalurahan.”(04 Januari 2025)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ulu-Ulu Atau (Kasih Kesejahteraan Masyarakat) dengan adanya partisipasi, komunikasi, transparansi, dan tindakan nyata. Maka kinerja pamong dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dan Pemerintah. Dengan memberikan contoh salah satu tindakan nyata, seperti mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan penelitian melakukan wawancara dengan Riska selaku masyarakat Jomblangan mengatakan:

“Partisipasi yang ada di kalurahan sudah berjalan, contohnya saya terlibat dalam kegiatan ibuk-ibuk Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang ada di padukuhan. Pemerintah kalurahan juga menyewakan tanah kas kalurahan ke masyarakat kalurahan, dan saya juga menyewa salah satu kios yang dikalurahan banguntapan. “(18januari 2025)”.

Berdasarkan pernyataan ketiga informan dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dan efektif sangat membutuhkan

dukungan besar dari seorang pamong dan kerjasama. Dengan kehadiriran seorang pemimpin masyarakat berperan penting dalam memotivasi, memfasilitasi, mengarahkan dan menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan. Maka peran aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Banguntapan bisa mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan.

Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai inovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi kalurahan dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sumber daya alam yang ada dikalurahan dapat lakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan dan pendampingan secara berkala bagi perangkat kalurahan dan masyarakat. Dalam pengelolaan, perencanaan, pembangunan, pelayaan, mengadakan sosialisasi, pendampingan kelompok UMKM, kelompok tani dan lain-lain. Maka dapat bisa melakukan rekutmen tenaga bidang seperti ekonomi pertanian dan parawisata untuk mengelola potensi yang ada dikalurhan dan pemerintah kalurahan bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial. Berkommunikasi dengan masyarakat mempromosikan potensi kalurahn.

Peneliti juga berpandangan Dalam penguatan kelembagaan pemerintah kalurahan banguntapan bisa merevitalisasi badan usaha milik Kalurahan (BUM Kal) untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan dan membentuk kelompok tani, UMKM dan lainnya untuk meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian. Kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi, mendukung pembangunan Kalurahan. Dengan partisipasi

masyarakat dalam merancang pembangunan untuk menentukan arah pembangunan kalurahan. Dan membentuk forum sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan kalurahan serta trasparansi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan di atas, maka bahwa dari penelitian berjudul “Inovasi Penguatan Pemerintahan Desa untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Desa” dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia sudah memadai secara kuantitatif namun belum secara kualitatif karena sumber daya manusia yang ada seringkali belum mampu mengelola potensi Kalurahan. Sumber daya manusia belum mampu mengembangkan ide, gagasan pengelolaan secara kreatif. Akibatnya potensi lokal seperti pertanian, pariwisata dan kerajinan tangan belum dapat dikembangkan secara maksimal.
2. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan bisa meningkatkan pelatihan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pembangunan. Dengan penguatan peran kelembagaan kalurahan seperti adanya BUM kal dan Lembaga masyarakat lainnya, dalam pengelolaan potensi Kalurahan
3. Partisipasi masyarakat yang aktif dan efektif sangat membutuhkan dukungan besar dari seorang pamong dan kerjasama. Dengan kehadiriran seorang pemimpin masyarakat berperan penting dalam memotivasi, memfasilitasi, mengarahkan dan menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Kalurahan. Maka peran aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat

dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Banguntapan bisa mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka pada bagian ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Kalurahan mengembangkan sumber daya manusia dengan cara mengadakan pelatihan pengembangan kepemimpinan. Serta meningkatkan kualitas sumber daya alam dengan cara melakukan pengawasan dan kerja sama.
2. Agar Pemerintah Kalurahan meningkatkan kompetensi dan mendorong inovasi.
3. Agar Pemerintah Kalurahan mengadakan sosialisasi tentang program-program pembangunan Kalurahan dengan mengadakan pertemuan masyarakat, dan memanfaatkan media sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat agar dapat mempromosikan potensi Kalurahan serta mengajak masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berikut Contoh gambar sebuah inovasi dengan perbedaan pasar tradisional dan modern dimana suatu komporasi antara pasar bantengan yang belum terstruktur dengan baik dan contoh pasar modern yang sudah terstruktur baik, ini menjadi contoh yang harus dilakukan oleh pemerintah kalurahan banguntapan supaya pasar bantengan bisa tersusun dengan baik.

Gambar 4.1: Pasar Bantengan Kalurahan Banguntapan



Sumber: Data Lapangan Penelitian 2025

Gambar 4.2: Pasar Bantengan Kalurahan Banguntapan



Sumber: Data Lapangan Penelitian 2025

Berikut contoh gambar pasar bantengan yang dimiliki Kalurahan Banguntapan dapat disimpulkan bahwa kekurangan fasilitas yang tidak memadai, tata letak yang tidak rapi, dan kualitas produ yang tidak kosisten. pembangunan pasar tradisional ditengah kota yang penuh dengan kehidupan dan warna. Pemerintah Kalurahan harus meningkatkan fasilitas, mengatur tata letak pasar agar lebih rapi dan memudahkan pengunjung apa yang mereka carik, mengembangkan pengunaan

teknologi serta meningkatkan kualitas produk yang dijual di pasar dengan melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas yang lebih ketat. Dari semua ini salah upaya memberikan manfaat bagi masyarakat Kalurahan Banguntapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perekonomian serta kepuasan pengunjung.

Gambar 4.3: Contoh Pasar Modern



Sumber: Web Internet 2025

Gambar 4.4: Contoh Pasar Modern



Sumber: Web Internet 2025

Berikut contoh gambar pasar tradisional modern fasilitas yang lengkap dengan fasilitas yang lengkap, seperti tempat parkir yang luas, toilet yang bersih dan fasilitas penunjang lainnya, tata letak yang rapi dan terstruktur, sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari, penggunaan teknologi untuk memudahkan transaksi dan pengelolaan, seperti sistem pembayaran elektronik dan aplikasi pengelolaan pasar, dan kualitas produk yang baik sehingga pengunjung dapat memperoleh produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga manfaat pasar tradisional modern dapat meningkatkan kualitas hidup, perekonomian, dan kepuasan pengunjung. Pasar tradisional modern ini menjadi contoh dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian Kalurahan Banguntapan. dengan fasilitas yang lengkap, tata letak yang rapi, penggunaan teknologi, dan kualitas produk yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, Nur Inna, and Dwi Listia Rika Tini. 2022. "Inovasi Pemerintah Desa Lobuk Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Dan Berkelanjutan Lobuk Village Government Innovations in Realizing Independent and Sustainable Village." *Public Corner* 17(1):13–25.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Astomo, Putra. 2014. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Good Governance Principles in Running Governance)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (64):401–20.
- Diyantasari, Desiana Reni, Dian Wijaya, and Hikmah Muhammin. 2021. "Vol. 2, No.1, Juni 2021." 2(1).
- Garcia, Rosanna, and Roger Calantone. 2002. "A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review." *Journal of Product Innovation Management* 19(2):110–32. doi: 10.1016/S0737-6782(01)00132-1.
- Hardiana, Seri Fhathul, Adam Idris, and Melati Dama. 2018. "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 6(2):931–44.
- Hasanah, Hasyim. 2017. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8(1):21. doi: 10.21580/at.v8i1.1163.
- Irawan, Jairi, Bintoro Wardiyanto, and Erna Setijaningrum. 2023. "Inovasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Neo Institusionalisme." *Journal of Social Development Studies* 4(2):267–82. doi: 10.22146/jsds.6882.
- Juliarso, A & Hidayat, E. S. 2017. "Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa." *Dimamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Negara* 4(2):361–68.
- Karuniyati, Putri, Adji Suradji Muhammad, Mahadiansar Mahadiansar, Universitas Maritim, Ali Haji, and Universitas Brawijaya. 2022. "Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik Strategi Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan." 12(2):269–86.
- Kurniandini, Sholeh, and G. Ika Pradewi. 2023. "Pengembangan Desa Inovatif

- Untuk Meningkatkan Perekonomian Dan Kemandirian Masyarakat Di Desa Banaran Kabupaten Temanggung.” *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 5(1):49–62. doi: 10.24952/taghyir.v5i1.4976.
- Mawaddah. 2017. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru.” 11–41.
- Nirmala, A. Sahi, Tumuhulawa Arifin, Nuna Muten, Biongan Ahiar, and Pauweni Lisnawati. 2022. “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Kebijakan Bumdes Di Wilayah Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango.” *Economics and Digital Business Review* 3(2):397–411.
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. “No Title No Title No Title.” *Journal GEEJ* 7(2).
- Prihatiningtyas, Wilda, Indria Wahyuni, Upik Dyah Eka Noviyanti, and Ardhana Christian Noventri. 2024. “Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa Yang Inovatif Dalam Mengembangkan Desa Wisata Di Desa Dongko, Trenggalek.” *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1):149–62. doi: 10.54082/ijpm.401.
- Sartika, Dewi. 2022. “Sosialisasi Strategi Kebijakan Program Inovasi Desa (Village Inovation Program) Terhadap Peningkatan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Tapanuli Selatan.” *Kalandra Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3):66–71. doi: 10.55266/jurnalkalandra.v1i3.150.
- Siswanto. 2019. “Pemerintah Desa Kendalsari.” *Repository Unisula* 248–320.
- Sudarta. 2022.” 16(1):1–23.
- Sugiman. 2018. “Pemerintahan Desa.” 7(1):82–95.
- Wijaya, Shadu Satwika, and Hendi Purnawan. 2023. “Inovasi Peningkatan Pendapatan Desa (Kasus Desa Karang Pucung, Tambak, Banyumas).” *Jurnal Inovasi Daerah* 2(1):105–16. doi: 10.56655/jid.v2i1.91.

Perundang-undangan

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014

Peraturan Gubernur No 25 Tahun 2019 tentang pedoman kelembagaan urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

PEDOMAN WAWANCARA

Pemerintah Kalurahan

A. Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan/pekerjaan :

PERTANYAAN

1. Bagaimana pemerintahan kalurahan dalam berinovasi untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi Kalurahan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam program-program?
3. Bagaimana Inovasi pemerintah kelurahan dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Kalurahan ?
4. Apakah Desa Banguntapan benar-benar telah menjadi Desa Mandiri atau masih dalam tahapan pengembangan?
5. Tindakan seperti apa yang anda lakukan setelah mendapatkan ide baru dalam pengembangan desa yang mandiri dalam pengoptimalan potensi desa?
6. Inovasi atau ide seperti apa yang menjadi pendukung dalam pengembangan potensi Desa?

7. Bagaimana cara anda mengambil keputusan dalam pengembangan potensi Desa ini?
8. Bagaimana peran pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mendukung inovasi dikalurahan?
9. Potensi inovasi apa yang masih bisa dikembangkan?
10. Apakah ada modal tersendiri yang digunakan dalam proses pengembangan potensi desa?
11. Jika ada, maka modal seperti apa yang dilakukan dalam proses pengembangan potensi Desa tersebut?
12. Bagaimana pengelolaan potensi desa yang ada ini supaya pendapatan asli desa terus berkelanjutan?
13. Apa saja kendala-kendala pemerintahan Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi yang ada sekarang ini?
14. Apa saja inovasi yang berhasil yang dilakukan Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi kalurahan ?
15. Bagaimana strategis pemerintahan Kalurahan dalam mempercepat pengelolaan dan mengembangkan potensi desa?

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat

A. Identitas Narasumber

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan/pekerjaan :

PERTANYAAN

1. Apa saja Inovasi atau ide kreatif yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
2. Apakah program pemberdayaan masyarakat masih berjalan
3. Potensi yang bisa dikembangkan Pemerintah Kalurahan Banguntapan
4. Bagaimana pendapat terkait Program- Program Kalurahan

LAMPIRAN

	Foto dan Wawancara dengan Lurah Banguntapan, Bpk. Basirudin pada 24 Desember 2024.
	Foto dan Wawancara dengan Carik dan Direktur BUM Kal Kalurahan Banguntapan, Bpk. Nunung Yulianto dan Sutik Mantoro pada 11 Desember 2024.



Foto dan Wawancara dengan Ulu-Ulu Kalurahan Banguntapan, Bpk. Priyono pada 4 Desember 2024.



Foto dan Wawancara dengan Ketua BAMUSKal, Bpk. Wiyadi pada 10 Desember 2024.



Foto dan Wawancara dengan Dukuh di Padukuhan Jomblangan, Bpk. Sigit pada 24 Desember 2024.



Foto dan Wawancara dengan Dukuh di Padukuhan Pelemwulung, Bpk Alfid Sulaksono pada 24 Desember 2024.



Foto dan Wawancara dengan tokoh masyarakat Kalurahan Banguntapan, Ibu Sumartinah pada 18 Desember 2024.



Foto dan Wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus penyewa kios Kalurahan Banguntapan, Ibu Riska pada 18 Januari 2024.



Foto dan Wawancara dengan tokoh masyarakat Kalurahan Banguntapan, Bpk. Tulus pada 10 Januari 2025.



Foto dan Wawancara dengan pamong Kalurahan Banguntapan dan Kaur Danarta Kalurahan Banguntapan pada 13 Desember 2024.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 102/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen
Pembimbing Skripsi

K e p a d a :

Analius Giawa, S.IP., M.Si

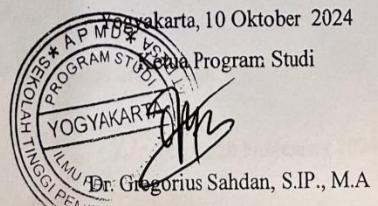
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Yohana Grace
No. Mahasiswa	:	20520127
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (S1) DAN KEGURUAN DAN PENDIDIKAN (D3)
Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 917/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Yohana Grace

No Mhs : 21520127

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Inovasi Pemerintah Kalurahan dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Tempat : Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul

Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.IP., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 28 November 2024
Ketua

Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

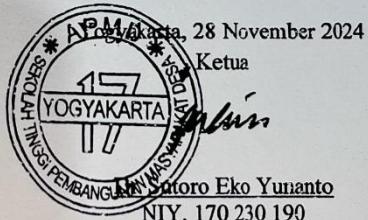
SURAT TUGAS

Nomor : 466/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yohana Grace
Nomor Mahasiswa : 21520127
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul
b. Sasaran : Inovasi Pemerintah Kalurahan dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN BANGUNTAPAN
ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟବିଦ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗୀ

Alamat : Jl. Gedongkuning 170 Bantul, Yogyakarta 55198 Tlp. (0274) 382849

Nomor : 40/Umum/BTP/XII/ 2024

Lamp : --

Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Yayasan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD)

Di. Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dengan segala hormat, menanggapi surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD), Nomor : 917/I/U/2024 tertanggal 28 November 2024 tentang, Permohonan ijin Pelaksanaan Penelitian di Kalurahan Banguntapan, Yakni dimulai dari tgl 10 Desember 2024 s/d 24 Desember 2024.

Adapun Mahasiswa yang akan melakukan penelitian tersebut telah melaksanakan tugas kuliah di Kalurahan Banguntapan.

Data Mahasiswa yang telah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

Nama : Yohana Grace
No Mhs : 215201227

Nama : Reni Alfianti
No Mhs : 21520040

Demikian surat balasan ini disampaikan agar menjadikan periksa adanya

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakaatuh.

Banguntapan, 24 Desember 2024

